

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Musibah yang terjadi di kalangan umat dunia berada pada titik masalah intelektual, kultural, ekonomi sosial dan pendidikan. Sejak abad ke 18 dan 19, peradaban Barat sudah mendapatkan pijakan kaki hampir di seluruh dunia baik dunia Islam maupun kalangan mereka sendiri<sup>1</sup>. Sementara, kaum orientalis menumbuhkan paradigma tentang kaum Muslim dengan menggunakan pendapat mereka sendiri. Sehingga merusak citra Islam di mata dunia. Ditambah lagi dengan stagnasi dan disintegrasi pemikiran kaum Muslim yang memudahkan kaum imperialis menjajah Islam di segala lini, baik pemikiran maupun bidang lainnya.

Keadaan inilah yang merosotkan keadaan kaum Muslim dan menyebabkan ketergantungan. Kaum Muslim saat ini banyak yang menjadi umat peniru, meniru perilaku budaya Barat yang sejatinya jauh dari ketentuan hukum Islam yakni Al-Qur'an dan

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Imarah, 1998, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Robbani Press, Jakarta. Hal xiv

As-Sunnah. Maka sangat mungkin, saat ini muncul kepentingan-kepentingan pribadi demi memuaskan akal dan kebutuhan jasmani saja. Alhasil, pertikaian terjadi baik dalam internal kaum Muslim sendiri dengan dalil *taqlid*<sup>2</sup> dalam pemikiran agama maupun tantangan eksternal yang secara terang-terangan memerangi kaum Muslim.

Munculnya ide ataupun keinginan dalam mengembalikan sistem politik Islam saat ini sudah menjadi perhatian dunia. Keberadaan istilah *Khilafah* merupakan wujud kerinduan umat Islam untuk membangun kembali kesatuan kepemimpinan dalam sistem politik Islam. Yaitu, sistem yang menerapkan syariat Islam dan dapat mengatur segala lini kehidupan baik umat Muslim maupun non Muslim. Sistem *Khilafah* ini menekankan pada kedaulatan mutlak atau otoritas tertinggi berada ditangan Tuhan. Sedangkan manusia hanya mampu menafsiri dan menerapkan hukum-hukum Tuhan.

---

<sup>2</sup> Taqlid atau taklid adalah menerima pendapat orang lain yang memiliki spesialisasi dan berpegang pada apapun pendapatnya tanpa mempertanyakan dalil yang mendasarinya. Menurut pendapat Al-Ghazali dalam al Mustashfa, Taqlid berarti ,menerima sesuatu perkataan dengan tanpa hujjah. Dan taqlid itu tidak dapat menjadi jalan menuju pengetahuan (keyakinan) urusan ushul maupun urusan furu. Dikutip dalam [www.alkhoirot.net](http://www.alkhoirot.net) dengan judul *Hukum Taqlid dalam Islam* pada Senin, 31 Oktober 2016.

Hizbut Tahrir adalah gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali *Khilafah Islamiyah*<sup>3</sup>. Untuk mewujudkan itu, Hizbut Tahrir mengerahkan metode atau langkah dalam mengambil alih kekuasaan (Sistem Internasional) dengan menggantikannya dengan sistem Islam. Tulisan ini menggali “cara dan upaya Hizbut Tahrir Indonesia (yang selanjutnya disebut Hizb) dalam menginternasionalisasikan ide *Khilafah Islamiyah* ke Indonesia”. Dengan demikian, pembaca dapat memilah apa yang menjadi urgensi dari perbaikan kondisi masyarakat maupun negara itu sendiri.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Gerakan Pan-Islamisme berkembang di abad ke 19<sup>4</sup>. Dunia Islam perlahan bangkit untuk melawan pengaruh dan tekanan Barat. Semenjak kemunduran umat pada abad

---

<sup>3</sup> Official Website, *Tentang Kami HT* diambil dari <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> pada 21 juni 2015

<sup>4</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, 2001, *Pembentukan Partai Politik Islam (Edisi Mu'tamadah)*, cetakan ke-4 penerjemah (Zakaria, Labib,dkk), HTI Press, Bogor.

pertengahan, dunia mulai bangkit dari keterpurukan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai pembaru dan pembaharuan Islam demi kemajuan dunia Islam. Munculnya gerakan pembaharuan ini, dikarenakan<sup>5</sup>timbulnya kesadaran para ulama terhadap *tsaqafah*(pengetahuan) asing yang masuk dan dipolitisasi sebagai ajaran Islam.

Gerakan pembaharu ini merupakan aksi reaksi umat Islam untuk bangkit dan membersihkan Islam dari ajaran yang menyimpang atau *tsaqafah* asing. Hal lainnya adalah hegemoni dunia barat dalam sektor penting negara seperti politik, ekonomi, perdagangan, dan lainnya<sup>6</sup>. Pengaruh dan otoritas dunia barat terhadap dunia memperlihatkan keterbelakangan umat Islam. Apalagi, umat Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk Muslim mencontoh peradaban Barat bagi peradaban bangsa. Hal ini merupakan bentuk agar negara tidak tertinggal dengan modernisme dan dikatakan mampu mengimbangi kekuatan bangsa Barat.

---

<sup>5</sup> ibid, Taqqiyuddin An-Nabhani

<sup>6</sup>Anonim, *Pembaharuan dalam Islam*, diambil dari <http://belajar.dedeyahya.web.id/2011/10/pembaharuan-dalam-islam-dan-tokohnya.html>

Sejak abad ke 20, fenomena organisasi global berkembang<sup>7</sup>.Setelah Perang Dunia II (PD II), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pusat pemerintahan global<sup>8</sup>. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi pemerintahan Internasional yang berskala global dan universal dan bertugas dalam menangani isu global yang sangat luas. Fungsinya menciptakan hukum internasional, norma, dan prinsip.Tata hubungan internasional yang terbentuk pasca PD II diwarnai dengan istilah yang bernuansa konflikatif. Bila masa awal sesudah PD II nuansa yang lebih menonjol adalah konflik Timur-Barat yang lebih bersifat ideologis-politis kemudian beralih ke konflik Utara-Selatan yang lebih bersifat ekonomi-ipitek<sup>9</sup>.

Dalam sejarah, gerakan dalam menuju terciptanya tata dunia berulang beberapa kali oleh gerakan pecinta damai, para filsuf, pemikir agama, imperialis maupun tokoh nasionalis fanatik<sup>10</sup>. *City-State* (Yunani Kuno) tercatat telah membentuk model pertama organisasi internasional yang bertujuan untuk

---

<sup>7</sup> Siti Muslikhati, 2003, dalam tesisnya *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Pembentukan Pemerintahan Dunia*,

<sup>8</sup> Margaret P.Karns dan Karen A. Mingst, 2004, *International Organizations*, Lynne Rienner Publishers, Boulder London.

<sup>9</sup>Loc.Cit. menurut Siti Muslikhati dalam tesisnya.Hlm. 6

<sup>10</sup> Loc.Cit, Siti Muslikhati. Hlm 4

menyusun Liga Amphictyonic<sup>11</sup>. Yunani menggunakan pola antara fragmentasi dan integrasi politik. Selanjutnya, pola-pola organisasi global seperti kerajaan Persia, Makedonia, Romawi, Byzantium, Arab, Ottoman dan Inggris bisa dijadikan contoh bentuk institusi politik global<sup>12</sup>. Tujuan dari institusi ini hampir sama yakni mencegah terwujudnya kehidupan anarki<sup>13</sup>.

Konsep *nation-state* didirikan secara substansial pada dasar filosofi oleh George Wilhelm Friedrich Hegel pada (1770-1831). Ia memandang bahwa sejarah peradaban manusia sebagai suksesi budaya nasional. Kebebasan hanya bisa ditemukan dalam konsep *nation-state* (negara-bangsa). Konsep turunannya adalah nasionalisme yang dipercayai mampu menyatukan bangsa. Di dalam tesisnya Siti Muslikhati, mulanya sistem negara bangsa dimunculkan pada Perjanjian Westphalia 1648 yang mengakhiri *Perang Tiga Puluh Tahun* antara Katholik dan Kristen Protestan. Dengan harapan sistem ini mampu menjadikan kehidupan

---

<sup>11</sup>Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfie, 1982, *Introduction to Internasional relations Power and Justice* Second edition, Prentice Hall. USA. Hlm. 50

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 50-52

<sup>13</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfie, 1986, *Introduction to Internasional relations Power and Justice.*, terj Mercedes Marbun, 1999, Putra A Bardin, Bandung. Hlm. 283-287

menjadi damai dan harmonis dan hubungan internasional lebih didasarkan pada hubungan yang sederajat antara negara yang masing-masing berdaulat.

Tetapi realitasnya, sejak 1648 kehidupan mengarah pada kondisi anarki, primitif, quasianarki, dan lain-lain<sup>14</sup>. Ternyata dengan adanya hubungan ini, tidak ditemukan adanya otoritas yang lebih tinggi dalam penyelesaian konflik di antara mereka. Alhasil terjadi hubungan yang sangat kompleks dan berpotensi bahaya karena setiap negara berupaya untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Konsep negara-bangsa menuntut negara memberi andil dalam kemajuan dunia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di sisi lain menyisakan bahaya dan mengancam kelangsungan kehidupan dunia<sup>15</sup>. Problem yang ditanggung dengan adanya konsep negara bangsa memberikan masalah humanitas yang ini tidak bisa dipahami sebatas konteks lokal dan regional. Hal ini mengingatkan kembali tentang gagasan tatanan dunia baru yang

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 52

<sup>15</sup> Loc.Cit, Siti Muslikhati. Hlm. 7

ini semata solusi untuk menghindari perang tapi bahaya akan perkembangan teknologi.

Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya *Clash of Civilizations and The Remaking of the World Order* menyatakan bahwa dunia dihidupi oleh 7 sampai 8 peradaban besar yaitu Western Christendom, Muslim, Sub Saharan, Hindu, Buddhist, Sinic, Japan<sup>16</sup>. Ia menambahkan sejak berakhirnya Perang Dingin, dunia beralih dari Blok Barat-Timur menuju banyak blok berdasarkan kebudayaan. Dunia terbagi tidak lagi berdasarkan kepentingan politik tetapi kebudayaan. Lajur perkembangan Islam di Asia Timur akan mengancam dominasi Barat. Tatanan dunia baru (New World Order) bisa dikatakan stabil jika semua peradaban fokus terhadap penghentian perang. Tetapi ancaman *New World Order* adalah tantangan yang didapat dari peradaban Islam dan Asia (Cina, Korea Utara, dan lainnya). Perlawanannya terhadap nilai-nilai Barat seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Dia menerangkan<sup>17</sup>:

---

<sup>16</sup> Ibid, muslimdaily.net

<sup>17</sup> Samuel, P. Huntington, *Clash of Civilization*. Harvard University. Hal 210



“Mereka akan melakukan perlawanan. Islam adalah satu-satunya peradaban yang mengancam keberlangsungan Barat dan hal itu telah dilakukan setidaknya dua kali...”.

Keterangan ini juga didapat dari Pejabat senior di era Clinton pada bukunya *Boston Globe*, pada 3 Juni 1994 halaman 18 yang menyatakan bahwa Islam sebagai saingan global dunia Barat. Seharusnya ini menjadi peluang bagi Islam dan keyakinan bagi kaum Muslim untuk menegakkan kembali Islam sebagai peradaban dunia. Walaupun, dampak-dampak keganasan Barat dahulu hingga saat ini menjadi halangan dan tantangan bagi Islam.

Keinginan untuk membentuk organisasi global merupakan reaksi terhadap perang. Walaupun dalam mencapai perdamaian, tak jarang dilalui dengan jalan konfliktual dan pertumpahan darah. Beda halnya dengan Prof. Dr. Harun Nasution, ia mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam dipandang sebagai permulaan periode modern dimana ide-ide Barat masuk ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan sebagainya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>Prof. Dr. Harun Nasution, 1975, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Bulan Bintang, Jakarta. Hlm. 11

Kaum Islam mulai memusatkan perhatian pada perkembangan modern dan mulai timbul pemikiran dan gerakan yang menyamakan faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yakni dengan pengetahuan dan teknologi modern itu. Modernisme itu lebih banyak mengandung makna negatif dibandingkan positif.

Presiden Institut Studi Strategis Alexander Kononov menerangkan, sebelumnya tata dunia baru yang membentuk peraturan permainan dan tindak-tanduk kekuatan dunia adalah hasil dari perang besar<sup>19</sup>. Tetapi, tatanan baru yang dihasilkan dari perang besar tersebut masih jauh dari peran agama di dalamnya. Konflik dan permasalahan tetap terjadi pada tatanan dunia saat ini dan mendesak akan butuhnya sebuah sistem tatanan baru yang melibatkan agama tapi tidak dengan jalan perang. Maka, negara butuh kelompok (jamaah) yang menginginkan pembaharuan untuk mewujudkan sistem tatanan yang baru yang tidak lepas dari keterikatan hukum mutlak (Tuhan).

---

<sup>19</sup>Anonim, Kebijakan AS dan Tatanan Dunia Baru, diambil dari [http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/30/putin\\_serukan\\_pembentukan\\_tatanan\\_dunia\\_baru\\_2573](http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/30/putin_serukan_pembentukan_tatanan_dunia_baru_2573)

Misi utama Islam adalah membangkitkan gerakan perubahan sosial dan meluruskan pola pikir umat manusia dengan acuan pandangan tauhid<sup>20</sup>. Tentunya dalam membuat sebuah *harakah*(gerakan) yang berdasar dengan ajaran tauhid perlu memenuhi berbagai syarat. Menurut Abdurrahman Muhammad Walid, tiga aspek yang harus dipenuhi bagi sebuah gerakan adalah; mempunyai target dan tujuan yang diusahakan dan hendak dicapai, mempunyai bentuk pemikiran yang telah ditentukan oleh *harakah*(gerakan) dalam aktivitas perjuangannya, mempunyai arah dan kecenderungan tertentu pada orang-orang yang bergabung dalam *harakah* dan anggotanya berasal dari kalangan Muslim<sup>21</sup>. Jadi, untuk menentukan identitas *harakah*(gerakan) agar dapat dikategorikan sebagai gerakan Islam semestinya memenuhi persyaratan diatas.

Ini yang menjadi kepercayaan Hizbut Tahrir untuk terus menyuarakan Islam dan mengambil alih kekuasaan dunia agar janji tersebut dapat kita jemput. Maka dari itu, Hizbut Tahrir

---

<sup>20</sup>Ibid, hal. xii

<sup>21</sup> Loc.cit. Abdurrahman Muhammad Walid, bab 1 hal 1

berdiri untuk mengembalikan peran Islam dalam mengatur kehidupan. Kemudian mengacu pada riwayat dari Nafi':

“Ia berkata: Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda: Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujjah (alasan atau argumen), dan siapa saja yang mati, dan sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada khalifah), maka ia mati seperti kematian jahiliyyah”<sup>22</sup>.

Ini dijelaskan bahwa pentingnya kedudukan penguasa (khalifah) dalam negara merupakan perkara wajib. Ini diperuntukkan untuk mengatasi perkara atau masalah yang ada ditengah-tengah kaum umat Muslim. Hal ini tidak akan terwujud tanpa sistem yang mengatur yaitu sistem Islam (seluruh ketentuan hukum-hukum yang bersifat syariah atau berdasar Al-Qur'an dan Hadits). Dalam hal ini, penguasa yang dimaksud adalah khalifah dan sistem yang dianut adalah sistem Khilafah Al-Islamiyah.

Istilah khilafah dalam terminologi politik Islam, mulai hadir saat Islam perlu melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah sepeninggalan beliau<sup>23</sup>. Khilafah Islamiyah menurut

---

<sup>22</sup>Mutafaqun Alaihi Muslim

<sup>23</sup> Wahyu Wibisana, 2011, *Khilafah Sebagai Sistem Politik*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.9 No.2

sejarah telah mampu menguasai dunia hingga 1400 tahun lamanya<sup>24</sup>. Khilafah menjadi sandaran, penjaga dan pelindung kaum Muslimin dan menjadi pilar utama sistem hukum Islam ditegakkan. Maka dari itu, Hizb sebagai subjek penelitian ini mempunyai misi untuk membangkitkan *Khilafah Islamiyah* kembali ke tengah-tengah umat dan penulis menggambarkan upaya apa saja yang dilakukan Hizb dalam menarik perhatian publik mengenai *Khilafah*di Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Hizbut Tahrir dalam memetakan konsep khilafah pada konstelasi internasional
2. Untuk menganalisa metode pergerakan Hizb dalam menarik perhatian publik
3. Untuk mengetahui fase perubahan sosial dan perkembangan Hizb dalam skala Internasional
4. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi Hizb dalam menginternasionalisasikan ide penegakan kembali *khilafah Islamiyah*

---

<sup>24</sup> Loc.Cit, Syabab Hizbut Tahrir. Pengantar hal vii.

5. Untuk memenuhi alasan akademik sebagai bentuk dari penerapan teori dan realisasi penyelesaian studi Strata-2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Mengacu pada permasalahan yang diterangkan diatas, penulis ingin membahas mengenai “bagaimana upaya Hizbut Tahrir dalam menginternasionalisasikan gagasan *Khilafah Islamiyah* ke Indonesia?”

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam bukunya *Syuro bukan Demokrasi*, **Dr. Taufiq Muhammad Asy-Syawi** mengklarifikasi berbagai penelitian dan pemahaman terhadap konsep *syura* yang menyimpulkan bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari demokrasi<sup>25</sup>. Dan dalam tesis ini beliau menjelaskan bahwa demokrasi mengambil nilai-nilai *syuro* dan demokrasi merupakan manifestasi *syura* versi Eropa. Buku ini juga hadir karena melihat fenomena kepalsuan

---

<sup>25</sup> Taufiq Muhammad Asy-Syawi, 1997, *Syuro Bukan Demokrasi*, Gema Insani Press, Jakarta. hal 21

pemikiran mengenai syura yang menyamakannya dengan demokrasi. Dengan ini Asy-Syawi membagi tentang syuro sebagai teori universal dalam syariat Islam agar dapat menyempurnakan konsep *Khilafah* yang diutarakan *As-Sanhuri* dalam kitabnya<sup>26</sup>.

Asy-Syawi menyinggung mengenai khilafah dan ciri penting dalam khilafah menurut *As-Sanhuri* ialah prinsip kesatuan umat. Mereka berpendapat bahwa persatuan itu tidak mungkin terpisah dari kemerdekaan. Sementara *konsep syuro* adalah kemerdekaan dalam wujud islami. Maksudnya, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat serta benteng bagi hak-hak pribadi, jamaah dan bangsa dimana sistem Islam harus tegak di atasnya<sup>27</sup>. Dalam hal ini syuro dijadikan mabda kehidupan dan posisinya lebih tinggi dari pada negara. Karena syuro yang ditentukan oleh syariat bersifat ketuhanan dan kekuasaannya di atas wewenang pemerintah dan para penguasa<sup>28</sup>. Singkatnya, syuro dijadikan sebagai benteng yang dibawahnya berlindung kaidah-kaidah pemerintahan Islam dan *Imamah* (kepemimpinan

---

<sup>26</sup> Ibid, Asy-Syawi. Hal 62-63.

<sup>27</sup> Ibid. Hal 38

<sup>28</sup> Ibid. Hal 38

umum). Dengan kata lain, syuro masuk dalam kaidah sosial yang sifatnya tidak terbatas dalam kerangka sistem pemerintahan Islam semata, tidak juga terbatas pada mabda-mabda yang mengikat para penguasa dan yang mengatur tanggung jawab mereka<sup>29</sup>. Mengamati dari pembahasan yang tertera didalam buku ini, penulis meletakkan posisi syuro sebagai konsepsi Islam bagi sebuah negara yang mengatur tentang kesetiakawanan, kerjasama dan pengaturan berbagai urusan masyarakat.

Menurut **Dr. Sidik Jatmika** dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional di Kawasan Timur Tengah*, salah satu babnya menjelaskan urgensi berdirinya ide Khilafah Islamiyah bagi Hizbut Tahrir<sup>30</sup>. Keinginan Hizbut Tahrir dalam menghadirkan kembali sistem Khilafah menjadi sistem di muka bumi ini bukan tanpa alasan. Disini terlihat beliau menulis bahwa ada beberapa alasan Hizbut Tahrir berdiri dan mempunyai misi dalam membangkitkan kembali Khilafah Islamiyah.

Pertama, keharusan berdirinya Partai-partai politik menurut syariat. Didalam surat Ali-Imron ayat 104, "*hendaklah*

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal 31-32

<sup>30</sup> Sidiq Jatmika, 2013, *Hubungan Internasional Di Kawasan Timur Tengah*, Yogyakarta. Hal 65



*diantara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran*". Urgensi ayat tersebut yang menjadi berdirinya Hizbut Tahrir ketengah masyarakat sebagai bentuk dari implementasi dan perwujudan dari kepatuhan terhadap perintah Allah. Perintah ini tidak hanya menunjukkan tuntutan tapi juga adanya sebuah keniscayaan kalau kelompok yang berorganisasi adalah kelompok yang harus mendakwahkan diri dalam menyerukan kebaikan dan menumpas kemungkaran. Penulis menyimpulkan bahwa jamaah yang dimaksud adalah haruslah berbentuk partai politik yang merupakan elemen politik. Tentu, partai politik tersebut memiliki kewajiban untuk mengoreksi kerja pemerintahan terhadap kebijakan (wajibnya pelaksanaan syariat islam) dalam negara. Hal yang perlu ditekankan adalah partai politik tersebut harus berasaskan islam baik dari segi pemikiran dan metodenya.

Kedua, keadaan sosial kemasyarakatan yang jauh dari ide-ide Islam. Hal ini yang membangkitkan Hizbut Tahrir untuk mengemban dakwah Islam dan mentransformasi keadaan sosial yang rusak menjadi masyarakat islam. Dengan upaya-upaya seperti mengubah ide-ide saat ini menjadi ide islam. Sehingga

kegiatan ini dapat mengubah cara berpikir umat dan mendorong mereka dalam mengaplikasikan kehidupan dengan tuntunan Islam. Selain itu juga mengubah perasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat menjadi perasaan islam. Alhasil, masyarakat dapat mengedepankan segala sesuatunya hanya untuk mengharap ridho Allah dan akan benci terhadap hal-hal yang sangat dimurkai Allah. Terakhir, mengubah tata pergaulan atau interaksi masyarakat saat ini menjadi interaksi yang islami (sesuai dengan hukum Islam).

Ketiga, adanya imperialisme orang-orang kafir (kufur atau tidak menerapkan sistem islam). Hizbut Tahrir berjuang untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya,serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. Alasan-alasan tersebut yang membangkitkan Hizbut Tahrir dalam mengembalikan sistem Khilafah dimuka bumi. Upayanya yang bersifat politis, aqidah Islam yang diemban tidak membatasi ruang geraknya hanya dalam satu aspek saja tetapi seluruh aspek kehidupan.

Menurut **Zulfadli** dalam tesisnya yang berjudul *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta* menggambarkan perilaku pergerakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam ideologis dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam dan mewujudkan penegakan kembali khilafah<sup>31</sup>. Disini dijelaskan bahwa cara Hizbut Tahrir melebur dalam kehidupan masyarakat dengan berorientasi pada aspek ideologis dan politis yang terkait dengan konsep *habitus*, arena perjuangan kekuasaan simbolik. Pertama, *habitus* dikonstruksi sebagai sebuah struktur mental yang diinternalisasikan melalui individu atau perorangan untuk memobilisasi tindakan guna memahami realitas sosial masyarakat. Kedua, *arena perjuangan* dikonstruksikan sebagai upaya mencari dan memperkuat jejaring antar berbagai posisi objektif yang dekat dengan hirarki kekuasaan untuk mendapatkan kedudukan sosial. Sedangkan *kekuasaan simbolik* sangat terkait dengan dominasi kekuasaan yang bersifat memaksa dan hal ini berlaku atau diakuinya suatu sistem dan perangkat ideologi (Islam) kepada pihak lain yang didominasi.

---

<sup>31</sup> Zulfadli, *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir Di Yogyakarta*, tesis magister studi politik dan pemerintahan dalam Islam, diujikan juli 2010, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dalam Jurnal Pendidikan Agama yang berjudul *Khilafah sebagai Sistem Politik*, Wahyu Wibisana sedikit menjelaskan tentang urgensi kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW<sup>32</sup>. Perlunya pengembalian kedaulatan mutlak yaitu kekuasaan Tuhan, yang dapat mengatur segala urusan masyarakat. Kemampuan manusia bukan terletak pada pembuatan hukum dan peraturan, melainkan menafsirkan hukum absolut (hukum Allah SWT) yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan manusia dalam berpikir tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi kehidupan dan kemaslahatan umat. Melihat kondisi peradaban umat Islam yang rapuh dan yang mengacu pada sistem peradaban dunia, penulis berpikir bahwa sistem Khilafah ini dirasa mampu dan bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan umat. Dalam jurnal ini, beliau berusaha meneliti sejauhmana sistem atau gagasan ini dapat berkembang. Memang diawal jurnal, adanya keinginan penulis dalam memperlihatkan implementasi atau urgensi khilafah. Tapi, pada pembahasan

---

<sup>32</sup> Wahyu Wibisana, 2011, *khilafah Sebagai Sistem Politik: Peluang dan Tantangannya*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Volume 9 Nomor 2. Hal 137-143

penulis tidak secara terperinci menjelaskan perkembangan signifikan dan korelasi dalam periode modern saat ini. Beliau hanya membandingkan pernyataan beberapa penulis dan menyimpulkan sebuah sistem khilafah tidak hanya dijadikan sebagai sistem tetapi khilafah yang ideal minimal memiliki tiga unsur yaitu; pemimpin yang cakap dan dipercaya, dominasi syariat islam dan fuqaha (ahli agama) sebagai wujud kedaulatan Tuhan dan terakhir adanya proses pemilihan yang berasal dari bawah yang memungkinkan semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi khalifah. Memang tidak dijelaskan mengenai konsep dan metode implementasi secara detail, penuli hanya menekankan pada peluang dan tantangan secara umum. Sehingga, diakhir pembahasan, penulis memperlihatkan kondisi pesimis akan terwujudnya khilafah. Hal ini dikarenakan oleh tidak relevannya sistem tersebut di periode saat ini.

Menurut *Abul A'la Al-Maududi* dalam bukunya yang berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, disebutkan bahwa khilafah yang baik dan benar itu adalah sistem sejak meninggalnya

Rasulullah<sup>33</sup>. Khulafaur Rasyidin<sup>34</sup> sebagai pengganti Rasulullah menerapkan sistem *al-khilafah ar-rasyidah* yang merupakan lanjutan atau pengganti kepemimpinan dalam pemerintahan sejak beliau wafat. Al-Maududi melihat dari proses penunjukan seorang khalifah (pengganti) Rasulullah. Islam menuntut adanya kekhalifahan yang didasarkan atas musyawarah, maka tidak satu keluarga pun memonopoli pemerintahan, tidak seorang pun merampas kekuasaan dengan kekuatan ataupun dengan paksaan dan tidak seorang pun mencoba untuk memuji dirinya atau memaksakan pribadinya guna mencapai kedudukan khalifah. Jadi hal ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya khilafah tanpa proses musyawarah dan baiat dari masyarakat. Al-Maududi mengutip dari *thaqabat ibnu Sa'd, jilid 4 halaman 113*, jika kepemimpinan yang benar adalah yang berdasarkan musyawarah. Adapun kerajaan adalah yang dimenangkan dengan kekuatan pedang. Jadi beliau menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Rasulullah saw memandang

---

<sup>33</sup> Abul A'la Al-Maududi, 1996, *Khilafah Dan Kerajaan*, Penerbit Mizan, Bandung, hal 111-129.

<sup>34</sup> Abu Bakar As-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib

khilafah sebagai suatu jabatan yang dipilih dan harus diputuskan berdasarkan kerelaan kaum muslimin dan hasil musyawarah antara mereka. Dari penjelasan diatas memperlihatkan analisis dan evaluasi yang berani dalam kurun sejarah pemerintahan Islam.

Mengamati penguraian dari berbagai penelitian baik dalam bentuk jurnal, tesis maupun buku, penulis memandang bahwa penelitian yang pernah ada sepanjang waktu mengenai khilafah dan partai politik hanya ditinjau dari segi urgensi dan kebutuhan umat sejak meninggalnya Rasulullah serta sedikit uraian umum mengenai *uslub*(cara) realisasinya. Hal ini yang menjadi *concern* penulis untuk meneliti lebih lanjut sikap sebuah partai politik terhadap urgensi tersebut dan bagaimana strategi yang terbaik untuk mewujudkan kembali Khilafah menjadi sistem kepemimpinan dunia. Mengingat bahwa kebutuhan umat akan kehidupan yang sejahtera dan saat ini dirasakan keadilan berada diujung tanduk. Perlu adanya khilafah kembali di tengah umat. Maka dari itu, untuk membedakan dan menambah penelitian yang ada sebelumnya, penulis akan mengkaji “upaya Hizbut Tahrir sebagai partai politik dalam menginternasionalisasikan ide

Khilafah Islamiyah (dalam konteks ini ke Indonesia)”dengan menggunakan pendekatan sosial yakni konstruktivisme.

### **E. Kerangka Teori**

Sebagai fungsi analisa, sebuah kerangka teori dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang telah menjadi pertanyaan dalam tesis ini. Kerangka teori adalah pondasi dan sebuah paramater atau batasan bagi sebuah studi. Dengan menggunakan kerangka, ini dapat membantu penulis untuk mendapatkan jawaban dari persoalan utama. Juga, perspektif dalam hubungan intenasional bisa dikatakan sebuah keharusan. Dengan perspektiflah peneliti mampu melihat isu yang sedang berkembang di masyarakat.

Dalam menganalisa sebuah realitas sosial dan riset ini mencapai sebuah objektivikasi yang tinggi, riset ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang dikenalkan oleh Peter L Berger. Menurut Peter L Berger dan Luckman proses mengkontruksi realitas sosial melalui tiga tahap besar *subjective reality*, *symbolic*



*reality* dan *objective reality*<sup>35</sup>. Proses ini juga didukung dengan tiga momen simultan eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

*Objective reality*, merupakan definisi realitas yang berlangsung dengan sangat lama dan telah diyakini kebenarannya sebagai bagian dari fakta sosial itu sendiri. Dalam konteks riset ini, organisasi sosial keagamaan telah memiliki infra-struktur dan supra struktur keagamaan yang terkontruksi dalam sebuah ide Khilafah Islamiyah yang bernilai eksklusif dalam menyelesaikan problematika hidup dan mampu mempengaruhi perubahan tindakan individu maupun kelompok. *Symbolic reality*, merupakan ekspresi simbolik yang dihayati sebagai “*objective reality*”. Dalam konteks ini, ide Khilafah Islamiyah menjadi simbol yang mampu memahami fenomena sosial dan solutif dengan menggunakan nilai-nilai dan hukum syariat Islam di dalamnya. *Subjective reality*, merupakan konstruksi definisi

---

<sup>35</sup> Sosial Keagamaan LP3M, 2015, *Pelebagaan Fiqh Konflik pada Organisasi Keagamaan Berbasis Islam Dalam Membangun Harmoni Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta*, LP3M. Hlm. 17. Proposal riset Program Bantuan Dana Riset Inovatif-Produktif Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (RISPRO LPDP). Diketahui oleh Dr. Surwandono dan anggotanya Prof. Dr. Tulus Warsito, Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, Dr. Arif Budi Rahardja, Dr. Muchammad Ichsan. Lc.MA, Drs. Maskul Haji, M.Pd.I

realitas yang diyakini oleh individu atau kelompok. Dalam konteks ini, adalah bentuk dari aktualisasi sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam merespon ide Khilafah Islamiyah.

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme sudah muncul ketika Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia sejak Plato menemukan akal budi dan ide<sup>36</sup>. Gagasan ini semakin konkrit ketika Aristoteles mengenalkan istilah informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Dikutip oleh Berten pada tahun 1999, Aristoteles mengatakan manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, berarti kunci dari pengetahuan adalah fakta.

Basrowi dan Sukidin, 2002 dalam bukunya halaman 194, mengutip dari pernyataan Aristoteles bahwa:

“dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media

---

<sup>36</sup> Argyo Demartoto, Teori Konstruksi Sosial Dari Peter I. Berger dan Thomas Luckman diambil dari <http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/> pada 14 November 2016

produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya”.<sup>37</sup>

Penulis memahami bahwa realitas sosial tidak akan bisa didapat jika tidak ada individu yang saling berinteraksi. Individulah yang mampu menghasilkan kehidupan sosial dan disanalah perubahan tersebut terjadi.

Sebuah konstruksi sosial erat hubungannya dengan istilah fenomenologi-fenomena dan pengetahuan. Hal ini dikembangkan oleh Berger dari perspektif terdahulu tentang sosiologi pengetahuan yaitu Weber dengan *interpretative understanding* (analisis pemahaman) terhadap fenomena dunia sosial, Scheler dan Schutz menambahkan dengan konsepnya *life world* (dunia kehidupan) yang mengandung dunia atau semesta yang kecil, rumit, lengkap terdiri atas lingkungan fisik, sosial, *intersubjektivitas* (interaksi antara manusia)<sup>38</sup>. Kemudian lanjut Marheim menyatakan tentang ideologi bahwa pemikiran manusia pasti dipengaruhi oleh ideologi. Dan dikembangkan lagi oleh

---

<sup>37</sup> Ibid, Argyo D. Hal 5

<sup>38</sup> makna intersubjektif menurut schutz, makna ini berawal dari konsep “sosial” dan “tindakan” yang artinya memiliki aspek kesamaan dan kebersamaan (common and shared). ini artinya antara struktur dan agen bisa dikatakan kedua hal yang mengikat dan saling mempengaruhi.

Berger, ia mengarahkan akan penafsiran terhadap gejala atau realitas di dalam kehidupan.

Konstruksi sosial memiliki penafsiran yang luas yang biasanya dikaitkan dengan pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Berger dan Luckmann mengemukakan asumsi dasarnya adalah “realitas merupakan konstruksi sosial”. Maksudnya, ada sebuah *claim* dan sudut pandang yang dihasilkan dari sebuah kesadaran yang itu didapat dari hubungan antara masyarakat dan budaya. Berawal dari individu yang bertindak tidak hanya ketika ada stimulus tetapi juga didorong dari makna subjektif yang dimiliki individu tersebut tentang tujuan yang hendak dicapai lewat tindakannya<sup>39</sup>. Kemudian beralih ke masyarakat yang memiliki satu kesatuan kompleks dan terkandung relasi antar manusia yang besar dan berpola<sup>40</sup>.

Riset ini hendak melakukan konstruksi baru terhadap fenomena organisasi Islam transnasional yang melakukan upaya dalam mensosialisasikan ide Khilafah Islamiyah menjadi sebuah realitas sosial melalui pembangunan realitas obyektif, simbolik

---

<sup>39</sup> Digilib.uinsby.ac.id

<sup>40</sup> Ibid, situs resmi UIN Surabaya yang mengutip pernyataan Hanneman Samuel, Peter L Berger, 2012, *Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok, Kepik.

dan subyektif melalui beberapa tahapan yang menjadi penting dalam hal ini.

**Pertama**, obyektivikasi. *Obyektivikasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif (interaksi antar anggota masyarakat) yang dilembagakan, “*Society is an objective reality*”. Proses ini merupakan langkah untuk membangun argument baru untuk menentang argument lama. Proses obyektivikasi dilakukan melalui proses-proses ilmiah, dan mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran konsistensi. Proses obyektivikasi dilakukan melalui proses mencari makna dari ide Khilafah Islamiyah baik dari pemeran utama (dalam hal ini Hizb) maupun *second opinion* (pendapat lain). Dengan mengkontruksi atau menilai relevansi ide Khilafah Islamiyah dalam konteks sosial, politik dan budaya saat ini. Sehingga akan ditemukan makna baru bahwa ide Khilafah Islamiyah kompatibel dijalankan di Indonesia.

**Kedua**, internalisasi. *Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. “*Man is a social product*”. Tahapan ini dilakukan dengan upaya

sosialisasi/ terjun ke masyarakat sehingga terjadinya perubahan pengetahuan terhadap nilai atau kebiasaan tertentu yang ada di dalam masyarakat. Alhasil, proses obyektivikasi dapat diintegrasikan dalam pandangan dan pemikiran seseorang. Di tahap inilah individu ataupun kelompok mampu mensosialisasikan ide atau nilai baru ke dalam masyarakat dengan menanamkan kepercayaan kepada kelompok masyarakat baik dari kalangan yang berbasis Islam ataupun di luar kalangan berbasis Islam (menyeluruh).

**Ketiga,** eksternalisasi. *Eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. “*Society is a human product*”. Proses ini dilakukan agar suatu nilai tertentu berubah menjadi sebuah pilihan bagaimana bertindak maupun berperilaku sehingga perubahan dan nilai baru dapat dibaca dan dipahami oleh pihak lain. Tahapan ini jika dilihat dalam konteks publik terlihat adanya produk kebijakan sebagai solusi permasalahan. Eksternalisasi dalam konstruksi ide Khilafah Islamiyah melalui penggunaan media publikasi yang saat ini menjadi sorotan dan pegangan publik dalam menerima informasi.

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi *concern* utama bagi penulis adalah upaya apa yang dijalankan Hizbut Tahrir dalam menginternasionalisasikan ide *Khilafah Islamiyah* ke Indonesia. Menjawab pertanyaan tersebut menggunakan pandangan konstruktivis, penulis berasumsi bahwa upaya Hizb dalam menginternasionalisasikan ide penegakan kembali *Khilafah Islamiyah* di era saat ini dengan tiga proses yakni **pertama**, *obyektivikasi* melalui pemaknaan ide Khilafah Islamiyah dari berbagai perspektif; **kedua**, *internalisasi* melalui sosialisasi ide Khilafah Islamiyah dengan pendekatan pemikiran; **ketiga**, *eksternalisasi* ide Khilafah Islamiyah melalui media publikasi.

## **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian sangat penting dilakukan dalam sebuah kegiatan ilmiah yang membutuhkan pemecahan dan penyelesaian. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian adalah upaya pemecahan masalah. Dengan adanya penelitian, penulis mampu menjelaskan dan menjawab permasalahan serta

mampu memberikan alternatif sebagai cara lain yang mungkin terjadi untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian dengan data hasil penelitian berupa gambaran atau bersifat deskriptif yaitu berupa hasil ucapan, tulisan dan perilaku individu atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subjek itu sendiri. Maka dari itu, melakukan wawancara terbuka dan observasi data merupakan upaya penting yang harus dilakukan untuk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok.

Dalam hal ini penulis mengupayakan untuk menggunakan tahap-tahap penelitian untuk merincikan variabel apa saja yang saling berkaitan dan mempengaruhi hasil dari penelitian yang akan dikaitkan dengan hipotesis awal. Dengan adanya tahapan ini, penulis akan lebih detail dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Tahapan tersebut antara lain:

### *1. Tahap Perencanaan*

Melalui tahap ini, penulis akan memulai dari memformulasikan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.



Juga menyertakan perencanaan strategi umum untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan menganalisa data dari sebuah penelitian. Tahapan ini harus dimulai dari memberikan titik fokus pada konsep dan hipotesis yang mengarahkan penulis untuk tetap pada koridor termasuk dengan mengumpulkan dan menelaah literatur dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian ini. Bisa dikatakan tahapan ini dengan “Term of references”.

## *2. Tahap Pengkajian secara teliti (terhadap Rencana Penelitian)*

Langkah ini merupakan pengembangan dari tahap perencanaan. Diawali dengan membuat deskripsi umum latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, prosedur analisis dan pengumpulan data. Ini dilakukan agar dapat mencapai tujuan pokok penelitian yang dengan ini disebut dengan usulan proyek penelitian.

### 3. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini penulis akan menjabarkan alur dan upaya pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini.

#### a. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang menjadi target penelitian atau unit analisisnya adalah partai politik Hizbut Tahrir. Kelompok ini dianggap solid dan konsisten terhadap tujuannya yang mempunyai jaringan yang tersebar diberbagai wilayah baik skala nasional maupun internasional. Pengorganisasian kelompok ini dikenal sangat rapi dan strategis. Pendekatan masyarakat (*grassroot*) yang mereka aplikasikan membuat kelompok ini sangat baik dimata masyarakat dan mudah diterima diberbagai kalangan. Untuk mempermudah penelitian ini, pengambilan data dilakukan di Yogyakarta.

#### b. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan metode wawancara (*depth interview*) dengan para ahli yang berhubungan langsung dengan topik ini. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan data original dan informasi yang lebih rinci dari tangan pertama mengenai ide-ide, konsep, proses perkembangan kelompok tersebut. Kemudian juga metode referensi pustaka yaitu dengan mencari sumber atau data resmi dari organisasi yang terkait serta data pendukung lainnya seperti internet dan elektronik data lainnya.

#### 4. *Analisis data*

Data penelitian yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Maksudnya penulis akan menggambarkan jawaban dari pertanyaan yang diterangkan diatas yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan langsung (wawancara) dan tidak langsung (studi pustaka).

### **H. Jangkauan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak keluar dalam pembahasan, jangkauan penelitian ini fokus pada upaya pembaharuan Pasca Perang Dunia II (PD II) pada pertengahan abad ke-20(1945) hingga saat ini (2016). Juga penulis akan sedikit menjelaskan produk dari Perjanjian Westphalia yang mengakhiri *perang tiga*

*puluh tahun* antara kelompok beragama di Eropa. Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan dengan waktu efektif (2 bulan).

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membagi pembahasan ini kedalam lima bab. Ini dilakukan untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara detail akan dijelaskan didalam kategori dibawah ini:

**BAB I** : PENDAHULUAN. Pertama, alasan pemilihan judul yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, kedua rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dan fokus dari penelitian ini. Ketiga, tujuan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian yang ditulis. Keempat, kerangka teori dimaksud untuk mendefinisikan dan menjawab isu yang diangkat. Kelima, hipotesis sebagai dugaan sementara penulis terhadap pertanyaan yang diajukan untuk mengarahkan kepada jawaban utama. Keenam, jangkauan penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar mempermudah penulis dalam pembahasan. Terakhir adalah sistem penulisan, sebagai rencana atau susunan dalam mempermudah penulis untuk

mengatur kepenulisan pembahasan isu yang diteliti dan mempermudah pembaca dalam mengetahui alur atau arah pemikiran penulis.

**BAB II** : PORTOFOLIO DAN EKSISTENSI HIZBUT TAHRIR SEBAGAI INFRASTRUKTUR NEGARA. Bab ini membahas mengenai kapasitas, aset bahkan amunisi yang dimiliki Hizbut Tahrir dalam mempertahankan keberadaannya dikancah internasional.

**BAB III** : PROBLEMATIKA SOSIAL, POLITIK DAN BUDAYA DI INDONESIA. Pada bab ini penulis menjabarkan kondisi Indonesia di tiga sektor yang menjadi kunci peradaban yakni sosial, politik dan budaya. Sehingga pembaca mampu melihat urgensi apa yang terjadi dan solusi apa yang akan terbentuk.

**BAB IV** : ANALISA UPAYA HIZBUT TAHRIR DALAM MENGINTERNASIONALISASIKAN IDE KHILAFAH ISLAMIYAH KE INDONESIA. Disini penulis akan menjelaskan cara atau taktik jitu Hizbut Tahrir dalam pandangan konstruktivisme untuk mewujudkan kembali

bangkitnya sistem Khilafah Islamiyah menjadi sistem kepemimpinan dunia.

**BAB V** : KESIMPULAN. Diakhir penelitian ini, penulis akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang dibahas diatas. Penulis berupaya akan memperlihatkan secara singkat dan keseluruhan mengenai strategi apasaja yang sedang dijalankan oleh Hizbut Tahrir demi mencapai penegakan kembali *Khilafah Islamiyah* di skala internasional.

## BAB II

### PORTOFOLIO DAN EKSISTENSI HIZBUT TAHRIR

Kapasitas atau pilar menjadi sebuah investasi bagi perseorangan maupun institusi dalam mempertahankan eksistensinya di mata publik. Tentu butuh kerja keras dan aspek-aspek khusus dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Begitu halnya dengan Hizbut Tahrir, ia merupakan kelompok politik yang tidak hanya bersandar pada aspek spiritual saja. Hizbut Tahrir menjadikan Islam sebagai *mabda*(ideologi) dan politik sebagai aktivitasnya. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, sekaligus sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya<sup>41</sup>. Dalam bab ini, penulis akan berusaha menjabarkan komponen-komponen yang dimiliki Hizbut Tahrir hingga mampu menunjukkan signifikansi perkembangan yang dialami sejak berdirinya kelompok ini. Hal inilah yang menjadi pegangan untuk meningkatkan kapasitas yang merupakan tujuan akhir dalam merelevansi gagasan khilafah Islamiyah di kehidupan modern saat ini. Poin ini akan

---

<sup>41</sup>Hizbut Tahrir, 2014, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.

memperlihatkan alur perkembangan dan asal pemikiran Hizb dalam mempertahankan konsistensinya dan tetap berprinsip menjalankan misinya.

### **A. Latar Belakang Hizbut Tahrir**

Latar belakang Hizb tidak terlepas dari sosok Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (1909) yang tumbuh dari keluarga ulama Ahlussunnah<sup>42</sup> di Palestina. Ayahnya (Syaikh Ibrahim bin Musthofa) seorang pengajar ilmu syariah di Kementerian Palestina<sup>43</sup> dan Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah. Juga perlu diketahui, Taqiyuddin merupakan garis keturunan dari seorang Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani yang merupakan kakek dari ibunya, dahulunya seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah yang sudah mengarang banyak kitab Islam.

---

<sup>42</sup>Lihat biografi Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Tesis Siti Muslikhati, *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Pembentukan Pemerintah Dunia*, 2003, Yogyakarta. Hal 43

<sup>43</sup>Ibid, Siti Muslikhati. Merupakan hasil wawancara langsung Ihsan Samarah dengan Mas'ud an-Nabhani, anak dari Paman Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada 12 November 1985, yang dikutip dari



Sejak umur belia (13 Tahun), ia sudah mampu menghafal Al-Qur'an. Pertumbuhannya tidak jauh dari pengaruh kakeknya yang sangat besar, selama tumbuh kembangnya ia mengikuti kakeknya ke majelis-majelis ilmu yang ternyata mengasah kecerdasannya. Sampai pada pendidikan tinggi, ia memutuskan untuk memilih pendidikan ilmu syariah di Kairo, Al-Azhar. Semasa perkuliahannya, ia mampu menunjukkan keunggulannya dengan memiliki pemikiran yang cerdas dengan pemahaman yang mendalam dan kokoh.

Setelah menyelesaikan studinya, ia kemudian pulang ke Palestina dan menjadi tenaga pengajar ilmu syariat Sekolah Tsanawiyah Nidhamiyah Haifa pada tahun 1932-1938 di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina<sup>44</sup>. Terjun menjadi seorang pengajar membuat ia menyaksikan pengaruh imperialis Barat yang sangat besar di dunia pendidikan. Fenomena ini membuat ia menjadi geram terhadap penjajahan Barat yang mencoba meninggalkan nilai Islam secara perlahan. Ia tak lantas meninggalkan aktivitas itu dengan kosong, tetapi ia membekali murid-muridnya dengan menumbuhkan kesadaran akan semangat

---

<sup>44</sup>Ibid, Siti Muslikhati. Hal 45

berpegang teguh pada Islam melalui dialog, diskusi dan perdebatan.

Tidak lama ia mengajar dan memutuskan berhenti, pada tahun 1948, ia menjadi seorang hakim (Qadhi) di Pengadilan Islam Yerusalem.<sup>45</sup> Selama disana ia menjadi sangat aktif dan menorehkan kegeraman terhadap administrasi Inggris terhadap Palestina dan kebijakan Raja Abdullah, juga tindak korupsi serta kemerosotan umat Muslim di dunia.

Keadaan tersebut membakar semangatnya untuk terus melontarkan berbagai masalah politik akibat penjajahan Barat ke dunia Islam. Ia terus membongkar strategi-strategi politik negara Barat yang ingin menghancurkan Islam dan umatnya. Dengan ini, ia melihat bahwa kaum Muslim mempunyai kewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan semangat kaum Muslim dan mengembalikan gairah kemuliaan dan kejayaan Islam. Aktivitas tersebut terus ia lakukan, berpindah dari kota ke kota dalam mengajukan ide yang

---

<sup>45</sup>L.R. Enthoven, 2014, University of Amsterdam

kokoh tersebut kepada para ulama, tokoh terkemuka maupun pemikir<sup>46</sup>.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ia menempuh pendidikan dan terjun langsung ke masyarakat menjadi tenaga pendidik mendorong ia merumuskan sebuah pemikiran. Pemikiran tersebut sebenarnya juga didorong atas peristiwa malapetaka besar yang terjadi sejak runtuhnya Daulah Islamiyah yang membuat negara kesatuan Islam terbagi menjadi pecahan negara-negara kecil dan membuat negara tersebut tunduk terhadap peraturan kaum Barat. Kemudian, menyusulnya peristiwa koalisi negara-negara kafir dengan anteknya para penguasa negara Arab yang mengakibatkan Palestina terampas dan tegaknya negara Israel<sup>47</sup>.

Sebagai bentuk nyata, kaum Muslim ternyata mendirikan gerakan baik Islam maupun non Islam untuk menyelamatkan diri dari penjajahan tersebut. Setelah melakukan berbagai kajian, penelitian dan pengamatan terhadap fenomena keadaan umat yang sudah perlahan menjauh dari peran Islam, akhirnya

---

<sup>46</sup>Ibid, Siti Muslikhati. Hal 48, diambil dari buku Taqiyuddin An-Nabhani, 1953, *At-Takatul Hizbiy*, Mansyurat Hizbut Tahrir, Hal 30-31.

<sup>47</sup>Hizbut Tahrir, 1989, *Manhaj Hizb Tahrir fi At-Taghyir*, Beirut. Hal.14

Taqiyuddin bersama teman ulama, mengajukan sebuah ide membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam yakni *Hizb at Tahrir*. Beliau memproklamirkan ide, pendapat, dan pemikirannya serta struktur keorganisasian. Kemudian, dibukukan sebagai sumber tsaqafah bagi partai dan materi pembinaan. Alhasil, pemikiran tersebut disetujui para ulama dan aktivitasnya pun semakin berkembang sehingga membentuk Hizb at-Tahrir di Al-Quds.

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam<sup>48</sup>. Tujuannya untuk mengembalikan kehidupan Islam dan mengembalikan negara Islam serta menjadikan Islam sebagai sistem dan menyebarkan ke seluruh dunia. Hizb menjadikan politik sebagai aktivitasnya. Karena Hizb ingin membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotannya yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem atau perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir

---

<sup>48</sup>Situs resmi, *About Hizbut Tahrir*, diambil dari [www.hizbuttahrir.org](http://www.hizbuttahrir.org)

didirikan atas dasar seruan Allah yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berisi mengenai<sup>49</sup>:

“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga).”

Inilah yang menjadi alasan Hizb hadir. Hizb bermaksud untuk mendorong kesadaran umat akan pentingnya perubahan<sup>50</sup>. Juga membangkitkan kembali umat dari kemerosotan yang sudah jauh di ambang batas kewajaran, membebaskan umat dari ide, sistem dan perundangan yang tidak sesuai dengan hukum Allah SWT<sup>51</sup>. Dengan Daulah Islamiyah, umat Islam mampu bergerak dan bangkit dari keterpurukan dominasi asing yang sudah menguasai kekuasaan agar kembali menuju jalan kebenaran (Allah SWT).

Keberadaan ayat di atas menunjukkan keharusan umat dalam membentuk dan bergabung dalam sebuah *jama'ah* (kelompok). Karena batasan kelompok tersebut ditentukan yakni

---

<sup>49</sup> Anonim, 2003, *Khilafah Solusi*, (judul asli *Khilafah is the Answer* diterjemahkan oleh Abu Faiz, *Khilafah Publication*), Thariqul Izzah, Bogor. Hal 27

<sup>50</sup> Loc. Cit. Hizbut Tahrir. Hal. 4

<sup>51</sup> Op.Cit, Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, hlm. 4

dakwah kepada yang *ma'ruf* (benar) dan mencegah kepada yang *munkar* (buruk). Jadi *jama'ah* (kelompok) juga harus dalam koridor yang benar (sesuai dengan syariat Islam). Yakni dasar pembentukan kelompok harus menggunakan Al-quran dan hadits sebagai pedoman *jama'ah* dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk melancarkan dakwahnya, gerakannya pun harus bersifat politis. Maka dari itu, hizb menyatakan diri sebagai partai politik yang menginginkan kembali Khilafah Islamiyah tegak.

Membentuk *jama'ah* disini ditunjukkan dengan adanya *thalab* (tuntutan dari Allah)<sup>52</sup>. Namun dilihat dari esensinya, ada kewajiban yang harus dijalankan yakni dakwah kepada Islam dan mengajak kepada kebaikan mencegah kepada keburukan hukumnya wajib atas kaum Muslim. Cakupan meliputi seruan terhadap penguasa agar mereka berbuat kebaikan (melaksanakan syariat Islama) dan melarangnya berbuat keburukan (sesuatu yang tidak bersumber dari syariat Islam). Aktivitas inilah yang menjadi penting yaitu mengawasi penguasa dan memberikan nasehat padanya. Ini disebut sebagai aktivitas politik, sehingga

---

<sup>52</sup>Ibid, Anonim, Hlm.7

ada kewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Islam adalah ideologi yang bersifat universal sesuai dengan fitrah manusia dan dapat memberikan pemecahan kepada manusia selayaknya manusia. Islam mampu mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa *gharizah* (naluri) dan *hajat al-udluwiyah* (kebutuhan jasmani) yaitu dengan mengaturnya dan mengatur pemecahan (pemuhan)nya dengan tatanan yang benar, tidak mengekang dan tidak melepaskannya sama sekali.

Semua ideologi selain Islam seperti kapitalisme, Sosialisme, Komunisme adalah ide yang merusak dan bertentangan pada fitrah manusia<sup>53</sup>. Ide ini merupakan buatan manusia dan tampak jelas kecacatannya. Mengambil, menerapkan, dan menyebarkannya termasuk hal yang dilarang dan diharamkan Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

“Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tiadalah akan diterima (agamanya itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi (yang akan masuk neraka).”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Ibid, Anonim. Hlm. 11

<sup>54</sup>Qur'an surat ke-3 Ali Imron ayat 85

Banyak upaya mendirikan gerakan dan partai untuk mengatasi permasalahan dan kemerosotan umat. Tetapi kegagalan masih merundung. Menurut Hizb inilah sebab kegagalan gerakan tersebut:

1. Tidak adanya pemahaman yang rinci terhadap pemikiran Islam. Dalam penakwilan dan penafsiran menjadikan fakta sebagai sumber inspirasi. Hal ini tidak sesuai dengan kandungan *nash* (teks Al-Qur'an dan As-Sunnah). *Nash* yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, ternyata berlawanan dengan Islam.
2. Tidak adanya kejelasan bagi mereka mengenai metode Islam dalam menerapkan ide dan hukum Islam dalam bentuk gambaran yang jelas dan sempurna. Dalam penyampaian ide melalui media yang tidak terencana dan diliputi kesamaran. Permisalan, anggapan dalam mendirikan masjid atau organisasi kemasyarakatan, menerbitkan buku-buku Islam bisa memperbaiki individu ataupun masyarakat. Padahal, perbaikan hanya bisa terwujud dengan cara meluruskan kembali ide, perasaan, serta aturan yang berlaku di masyarakat.



Cara inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Dakwah dimulai dari akidah, mengubah pemikiran, persepsi tradisi jahiliyah dengan persepsi dan hukum Islam. Alasan inilah yang menjadikan dasar berdirinya Hizb. Hizb menghindarkan diri dari seluruh unsur yang menjadi kekurangan maupun menjadi sebab kegagalan kelompok sebelumnya. Hizb memahami pemikiran dan metode dakwah secara rasional dan terperinci, sesuai dengan apa yang disampaikan wahyu. Hizb menjadikan fakta (masyarakat yang ada) sebagai sasaran objek pemikiran.

## **B. Tujuan Hizbut Tahrir**

Tujuan Hizb melanjutkan kembali kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia<sup>55</sup>. Maksudnya ada sebuah ajakan kepada umat Muslim untuk hidup secara Islam di *daarul Islam* dan di dalam masyarakat Islam. Segala perkara kehidupan diatur dalam konsep syara (Al-Qur'an dan Hadits) dan prinsip yang digunakan adalah atas dasar halal

---

<sup>55</sup>Loc.Cit, *Hizbut Tahrir. Mengenal Hizbut Tahrir*. Hal 25

dan haram. Ini semua akan diatur di bawah naungan Khilafah al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah dan dibaiat oleh seluruh kaum Muslimin untuk didengar dan dipatuhi. Khalifah bukan sebagai pembuat kebijakan, tetapi sama halnya dengan rakyat sebagai pelaksana hukum yang sudah ditentukan oleh hukum Allah SWT<sup>56</sup>.

Hizb juga bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar dan hakiki melalui pola pikir yang cemerlang. Hizb juga berusaha mengembalikan kejayaan Islam dan mengambil alih kendali negara-negara bangsa di dunia kepada Islam. Tidak hanya itu, Hizb ingin menyampaikan hidayah (petunjuk syariat) kepada umat yang ada di dunia, memimpin umat Islam untuk menyerang ide-ide yang telah menghancurkan keutuhan dan keagungan Islam<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Video profil “who are Hizb ut Tahrir?” oleh Syaikh Abu Rasyah (Amir HT saat ini)

<sup>57</sup> Loc.Cit. *Mengenal Hizbut Tahrir*. Hal 25

### C. Struktur Hizbut Tahrir

Hizb adalah partai atau organisasi *prudent*<sup>58</sup> yang artinya berhati-hati demi keamanan. Hizb tidak mempublikasikan struktur administrasi dan komando serta turunananya<sup>59</sup>. Walaupun secara aktivitas dan kegiatan terlihat sangat organisatoris dan terstruktur. Hal ini memperlihatkan bahwa Hizb memiliki struktur dan komando yang jelas tetapi tidak untuk konsumsi publik. Karena tujuan utamanya Hizb untuk memfokuskan anggotanya dan menghilangkan kekhawatiran akan mengaburnya peran masing-masing unit yang tergabung dalam struktural<sup>60</sup> dan lebih berfokus pada ide atau pemikiran atau konsep.. Juga urusan misi dan administratif merupakan dua hal yang tidak bisa dijadikan *hujjah* dengan mengaitkan keduanya.

---

<sup>58</sup> Wawancara langsung dengan humas regional Jogja (Bapak Yusuf Mustaqim) pada tanggal 17 November 2016 di Perpustakaan Pasca Sarjana

<sup>59</sup> Keterangan Ibu Iffah Nur Rochmah sebagai Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di *press conference* acara besar Konferensi Perempuan Internasional dengan tema Pemuda Muslim Pelopor Perubahan Hakiki pada 7 Mei 2016 bertempat di Hall Yudistira, JEC, Yogyakarta.

<sup>60</sup> Penjelasan mengenai kegagalan sebuah pergerakan akan ketidakjelasan dalam cara mengimplementasikan ide partai. Ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Party Structure*, ..... hal 2. ” *The failure of all these movements was natural, because they were not based on a correct, clear and defined idea. They also did not have a straight method, nor did they depend on persons with awareness, nor were they built on a proper bond.*”

Juga perlu ditekankan, mengenai struktur dan administrasi tidak ada kaitannya dengan suatu perubahan (tidak berkepentingan)<sup>61</sup>.

Taji Farouki sebagai peneliti mengenai partai politik Hizbut Tahrir mencoba untuk menggambarkan struktural Hizb berdasarkan penelitian yang ia lakukan.<sup>62</sup> Ia mengatakan bahwa Hizb adalah gerakan yang sangat teroganisir dan memiliki model struktur yang besar. Secara garis besar, struktural Hizb diawali dari kepemimpinan dari pusat yang memberikan pengarahan dan pelatihan kepada provinsi-provinsi di bawahnya.

Struktur Hizb di Indonesia sama halnya dengan negara lain. Hizb membagi kepemimpinan di negara menjadi provinsi yang disebut sebagai *wilayah*<sup>63</sup>. Dalam sebuah wilayah ada komite wilayah yang diketuai oleh *mu'tamad*. Di bawah provinsi yakni daerah atau lokal ada komite lokal yang diketuai oleh *naqib*. Mu'tamad sebagai pusat Hizb di wilayah yang menerima perintah langsung dari *Amir* (pemimpin pusat Hizb). Setiap agenda diatur oleh *mu'tamad* di setiap hal. Tugas *naqib* adalah

---

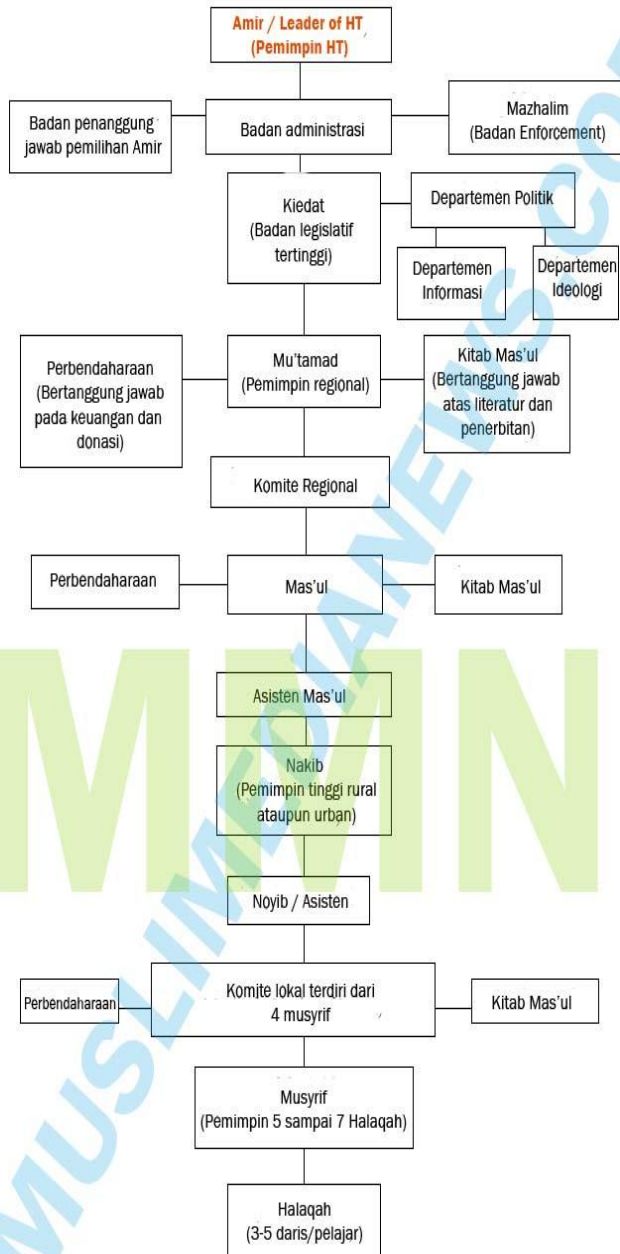
<sup>61</sup> Wawancara langsung dengan humas HTI Jogja pada tanggal 17 November 2016 di gedung Pasca Sarjana UMY

<sup>62</sup> Loc.Cit, L.R. Enthoven, 2014, University of Amsterdam. Hal 10

<sup>63</sup>Lihat Suha Taji-Farouki, *A Fundamental Quest, Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal, 1996). Hal. 116

menangani forum dan kelompok kecil di daerah atau regional. *Naqib* melaporkan langsung kepada *mu'tamad* sebagai pimpinan pusat. Di Indonesia, komite wilayah disebut sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang pertama kali dibentuk di bawah kepemimpinan Al-Baghdadi pada tahun 1990an. Di level regional disebut sebagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan pada level daerah ada Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Di setiap daerah, anggota partai dibagi menjadi kelompok kecil yang disebut sebagai *halaqah* yang biasanya beranggotakan 5-7 aktivis Hizb dan Hizbiyyin di dalamnya. Di atas DPP ada ketua yang mengetuai hirarki organisasi tetapi tidak seperti *mu'tamad*. Hizb sangat tertutup mengenai struktur kepemimpinan. Hanya anggota di dalam struktural tersebut yang mengetahui persis siapa yang terlibat. Di setiap dewan baik DPP, DPW, DPD ada departemen yang disebut *lajnah* yang fokus terhadap politik, ekonomi, pelajar. Pada departemen pelajar, membentuk Gerakan Pembebasan Mahasiswa pada tahun 2001.

# STRUKTUR HIZBUT TAHRIR



#### **D. Kaderisasidan Cabang Hizbut Tahrir**

Hizb menerima keanggotaan setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak membedakan antara suku dan ras<sup>64</sup>. Karena Hizb menjadikan diri sebagai partai seluruh kaum Muslim yang berhak dimiliki dan dimasuki oleh Muslim yang ada di muka bumi. Selain itu, Hizb juga melihat kaum Muslim dari segi pandangan Islam. Semua Muslim tergabung dalam satu keterikatan yakni agama Islam.

Cara mengikat individu-individu dalam Hizb adalah dengan menjadikan Islam sebagai akidah (akidah Islam). Yakni matang dalam *tsaqafah* (informasi) mengenai Hizb, mengambil dan menetapkan ide-ide serta pendapat Hizb. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadi anggota partai setelah melakukan kajian dan perenungan mendalam tentang pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat partai. Keanggotaan seseorang didasarkan pada kematangan individu dalam menguasai *tsaqofah* partai dan mengadopsi pemikiran dan pendapat partai<sup>65</sup>. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam keanggotan partai. Individu tersebutlah

---

<sup>64</sup> Loc.Cit, Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Hal 27

<sup>65</sup> Situs resmi HTI, [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)

yang menyatakan dirinya menjadi anggota Hizb, setelah terlibatnya di dalam kegiatan Hizb. Hal itu akan muncul ketika interaksi terwujud dan individu akan mengikuti persepsi Hizb. Tetapi, jalinan dan keyakinan mengikuti tersebut dilahirkan atas akidah Islam. Kemudian ada tahap pembinaan (*halaqah*) yang ini dilaksanakan terpisah antara perempuan dan laki-laki. wanita akan dibina oleh mahromnya.

Sistem kaderisasi anggota Hizb membutuhkan langkah yang panjang dan komitmen yang kuat dari calon anggota yang ingin menjadi anggota HT. Yakni dengan mempelajari lebih dari 20 kitab, beberapa diantaranya adalah *nidzomul Islam* (sistem Islam), *minmuqowimah* (tafsir Islamiyah/ Peneguh pilar-pilar kepribadian Islam), *mafahim HT*, *takaful hisbi* dan lain-lain<sup>66</sup>. Tahapan inilah yang menjadi prasyarat calon anggota untuk memahami ide dan pemikiran HT. Kemudian, setelah mempelajari semua kitab tersebut akan ada evaluasi dan sumpah anggota (*qosam*) sebagai janji para anggota untuk menyebarkan ide ke tengah masyarakat. Adapun sumpahnya berisi: *satu*, aku

---

<sup>66</sup> Ibid, wawancara langsung dengan humas HTI Jogja



akan menjadi penjaga Islam dan *dua*, aku akan memperjuangkan apa yang diperjuangkan Hizbut Tahrir. Sejak diakuinya Hizb di tahun 1953 hingga tahun 2011, perkembangan Hizb sudah sampai lebih dari 40 negara di dunia<sup>67</sup> (baik Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia). Di Indonesia, Hizb tersebar di seluruh provinsi Indonesia dengan 200 kota/kabupaten cabang provinsi<sup>68</sup>.

#### **E. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir**

Hizb melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kondisi umat dan membandingkannya dengan kondisi di masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan generasi *tabi'in*<sup>69</sup>. Hizb bercermin dari *sirah* (perjalanan) dan tata cara Rasulullah dalam berdakwah dan akhirnya berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Tentunya, rujukan utamanya adalah kitabullah dan sunah rasul-Nya serta Ijma Sahabat dan Qiyas, ungkapan sahabat *tabi'in*, imam mujtahidin. Semua idenya,

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan humas regional Jogja (juru Bicara HTI), bapak Yusuf Mustaqim di perpustakaan pasca sarjana UMY tanggal 17 November 2016

<sup>68</sup> Mohamed Nawab Mohamed Osman, *Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia* (Singapore: Journal 2009). Hal.8

<sup>69</sup> Loc.Cit, Anonim, Hlm. 35

pendapat dan hukumnya hanya berasal dari Islam. Secara keseluruhan ide murni dari Islam. Selain itu, Hizb juga menyandarkan pada pemikiran (akal sehat) dalam penetapannya.

Ide-ide Hizb dihimpun dalam berbagai buku dan selebaran yang ini disebarluaskan kepada umat, berikut<sup>70</sup>:

1. *Nidhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *Nidham Al-Hukmi fi Al-Islam*(Sistem Pemerintahan Islam)
3. *An-Nidham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*(Sistem Ekonomi Islam)
4. *An-Nidham Al Ijtima'i fil Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam)
5. *At-Takatul Hizby* (Pembentukan Partai Politik)
6. *Mafahim Hizb at Tahrir* (Pokok-Pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
7. *Ad-Daulah Al-Islamiyah* (Negara Islam)
8. *Asy-Syaksiyah Islamiyah* (Keperibadian Islam, *Juz I,II,III*)
9. *MafamimSiyasiyah Li Hizbit Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
10. *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pandangan Politik Hizbut Tahrir)

---

<sup>70</sup> Ibid, Anonim, Hlm. 37-38

11. *\Muqaddimah Ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)
12. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
13. *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Negara Khilafah)
14. *Nizham al-'uqubat* (Sistem Sanksi)
15. *Ahkam al-Bayyinat* (Hukum Pembuktian)
16. *Naqdlu al-isytirakiyah al-marksiyah* (Kritik terhadap Sosialis Marxis)
17. *At-Takfir* (Membangun Pemikiran)
18. *Sur'atul Badihah* (Kecepatan Berpikir)
19. *Fikru al-Islami* (Pemikiran Islam)
20. *Naqdlu an-Nadlariyatu al-iltizami fi al-Qawanini al-Gharbiyyah* ( Kritik terhadap Teori Stipulasi Undang-undang Barat)
21. *Nida'un Har* (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam)
22. *Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
23. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah)

Tidak hanya buku, Hizb juga menerbitkan selebaran, buklet, diktat, dan majalah baik mengenai ide maupun politik. Caranya pun dalam menyampaikan ide-ide dan hukum dengan cara politik yakni dengan menyampaikannya kepada masyarakat hingga diterima oleh masyarakat, diamalkan dan turut mengembannya agar bisa terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan.

#### **F. Aktivitas dan Titik Tolak Hizbut Tahrir**

Aktivitas yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir yaitu mengemban dakwah Islam yakni dengan mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Proses perubahan dilakukan dengan mengubah ide sebelumnya menjadi ide Islam<sup>71</sup>. Sejak berdirinya Hizb oleh Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani, Hizb berkembang secara konservatif. Upaya ini terlihat pada Syekh Taqiyyuddin yang melakukan kontak langsung dengan masyarakat<sup>72</sup>. Penulis melihat adanya upaya *direct*

---

<sup>71</sup> Op.Cit, Hizbut Tahrir. Hal 28-31

<sup>72</sup> Ibid, Syabab Hizbut Tahrir. Hal 166-172

*marketing*<sup>73</sup> untuk memasuki pemikiran dan memahami pemikiran (ide) kepada masyarakat. Sehingga, persepsi masyarakat menjadi opini umum yang akan mendorongnya dalam merealisasikan dan menerapkan tuntunan Islam.

Tidak hanya itu, perasaan merupakan perkara internal yang harus diubah bagi pribadi masing-masing individu. Karena inilah yang akan mempengaruhi sensitifitas atau kepekaan masyarakat terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan mengubahnya menjadi perasaan Islam, perseorangan akan menjadikan tolak ukur Islam dalam semua tindakannya dan akan memberontak jika ada yang bersimpangan dengan Islam.

Seluruh aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politik, memperhatikan urusan masyarakat dengan standar hukum dan pemecahan yang syar'i<sup>74</sup>. Karena dengan politiklah, negara dapat

---

<sup>73</sup> Direct marketing adalah upaya mendatangi langsung kepada personal atau individu terhadap apa yang ditawarkan sehingga lebih mudah memahami jalan pemikiran yang dipikirkan objek yang terpilih. Menurut Margareth Rouse, di dalam artikelnya yang berjudul *Direct Marketing* dikutip dari [www.searchcrm.techtarget.com](http://www.searchcrm.techtarget.com), penulis menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk atau gaya pengenalan (menanyakan dan memberikan informasi) kepada objek terhadap sesuatu yang ditawarkan maupun ditanyakan dengan berkomunikasi (atau berhubungan) langsung terhadap objek yang terpilih

<sup>74</sup> ibid

mengatur urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam. Dalam praktisnya, tampak adanya pembinaan dan didikan umat dengan pengetahuan Islam, melebur dengan Islam, dan membebaskan diri dari akidah yang rusak, pemikiran keliru serta melepaskan pengaruh ide-ide barat.

Di dalam aktivitas politiknya juga tampak pada kedua hal yakni pergolakan pemikiran (*Shira'ul Fikri*) dan perjuangan politik (*kifahul Siyasi*)<sup>75</sup>. *Shira'ul Fikri* terlihat adanya penentangan terhadap ide dan aturan selain aturan Allah. Sedangkan *perjuangan politiknya* terlihat pada penentangan terhadap imperialis kafir untuk membebaskan umat dari kuasa dan cengkeraman kaum kafir (menolak kebenaran Allah) baik berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi maupun militer. Juga perlawanan terhadap penguasa, membongkar pengkhianatan mereka pada umat dan konspirasi mereka terhadap umat dan sebagai pengoreksi gaya kepemimpinan mereka (baik terhadap hak umat, kewajiban terhadap urusan umat bahkan jika menyalahi hukum Islam)<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Loc.Cit, Hizbut Tahrir. Hal 28-32

<sup>76</sup> Loc.Cit. video profil HT “*who are Hizb ut Tahrir*”

## **G. Tempat Aktivitas Hizbut Tahrir**

Walaupun Islam bersifat universal, tetapi fokus aktivitas dakwah harus ditetapkan pada satu atau beberapa negerisehingga aktivitas dapat dikonsentrasikan menegakkan Daulah Islamiyah<sup>77</sup>. Dunia secara keseluruhan merupakan tempat yang layak bagi Islam. Tetapi, karena negeri Islam memiliki penduduk yang mayoritas Islam maka dakwah bertolak mulai dari area ini. Selain itu, negara Arab menjadi bagian dari Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa keseharian dan ini berasal dari bahasa Al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>78</sup>. Sehingga ini menjadi salah satu yang penting dalam Islam. Juga ini merupakan unsur pokok dalam *tsaqafah* Islam. Oleh karena itu, negeri Arablah yang menjadi prioritas dalam mengemban dakwah ini. Hizb tumbuh dari negeri Arab dan perkembangannya pun menyebar di hampir seluruh jazirah Arab. Dakwahnya berawal dari sini dan menyebar secara alami sehingga aktivitasnya terdapat di negeri Arab dan negeri Islam lainnya.

---

<sup>77</sup> Loc.Cit. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Hlm. 33

<sup>78</sup> Ibid, Hlm. 34-35

## H. Metode Dakwah Hizbut Tahrir

Metode yang ditempuh dalam mengemban dakwah berupa hukum *syara'* yang diambil dari *thariqah* perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kewajiban ini tertuang pada firman Allah SWT:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah).”<sup>79</sup>

Kondisi kaum Muslim saat ini hidup di *darul kufur*<sup>80</sup>. Dikarenakan sistem yang digunakan bukan dari apa yang diturunkan Allah SWT serupa dengan keadaan negeri Makkah pada saat diutusnya Rasulullah SAW. Fase inilah yang harus dijadikan acuan dalam mengemban dakwah dan dijadikan sebagai objek untuk diteladani. Keberhasilan Rasulullah di kota Makkah tampak jelas dicapai dengan beberapa tahapan. Hizb telah mengambil metode dakwah Rasulullah SAW dari segi operasional maupun tahapan-tahapannya.

---

<sup>79</sup> Q.S Al-Ahzab (33) ayat 21

<sup>80</sup> Ibid, Anonim, Hlm. 41



Dalam menyempurnakan idenya, penulis melihat Hizb fokus terhadap tiga titik diantaranya<sup>81</sup>:

1. *Tatsqif*. Hizb memulai dengan mengenali dan belajar budaya (kebiasaan masyarakat)/ pendekatan individual, karena masyarakat terdapat sekumpulan individu yang di dalamnya memiliki perasaan, pemahaman, pandangan. Sehingga dengan ini mudah memahamkan ideologi partai.
2. *Tafa'ul*. Kemudian masuk ke titik berinteraksi dengan umat dan berjuang agar masyarakat menerima ideologi partai sebagai pemahaman mereka. Alhasil, ideologi partai tersebut menjadi opini mereka dan dengan kesadaran akan mewujudkan ide tersebut.
3. *Istilamu Al-Hukmi*. Memperoleh dan mengambil alih kekuasaan melalui umat untuk mengimplementasikan ideologi pada skala yang lebih luas. Karena di dalam Islam tidak diperbolehkan menerapkan hukum sebagian dan melupakan sebagian yang lainnya. Maka dari itu, penerapan ide/hukum secara total dan implementasi Islam menjadi suatu keharusan yang harus disebarluaskan.

---

<sup>81</sup> Loc.Cit, Anonim, *Khilafah Solusi*. Hal 39-70

Hizb Tahrir memulai tahap pertamanya di kota Al-Quds oleh seorang Qadhi Taqiyyuddin an-Nabhani Rahimahullah<sup>82</sup>. Hizb melakukan kontak langsung dengan masyarakat, menyampaikan *fikrah* dan *thariqah*, pembinaan intensif dalam halaqah hingga menyatu dengan ide dan hukum Islam sebagai pedoman. Kemudian menjadikan seorang Muslim memiliki keperibadian dan berinteraksi dengan Islam, menghayati serta memiliki pola pikir dan sikap Islam. Selanjutnya, melakukan kegiatan dakwah dan dengan sendirinya setelah semua tahapan ini terjadi umat akan menggabungkan dirinya dengan Hizb. Inilah yang diadopsi oleh Hizb dari Rasulullah SAW.

Pada tahapan awal, perhatian Hizb fokus kepada pembinaan kerangka Hizb, memperbanyak pendukung dan pengikut serta membina para pengikut dalam *halaqah* Hizb yang terarah dan intensif. Hingga berhasil membentuk partai bersama *syabab* (pemuda) yang menyatu dengan Islam dan menerima pemikiran Hizb. Setelah berhasil membentuk partai dan

---

<sup>82</sup> Loc.cit, Anonim. Hlm 44-45

masyarakat mulai mengenal Hizb dan idenya maka sampailah pada tahap kedua.

Tahap kedua, berinteraksi dengan masyarakat dan mendorong mereka untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas ide dan hukum Islam yang telah dipilih Hizb hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha diwujudkan dalam realita kehidupan. Bersama masyarakatlah, Hizb dan umat mampu mendirikan Daulah Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah untuk melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Tampak ada tahapan-tahapan yang kolektif dilalui Hizb untuk mengembangkan aktivitasnya, yakni;

1. Dengan perekrutan dan pembinaan intensif(*Tsaqafah Murakkazah*) yang dilakukan secara langsung kepada individu-individu di dalam masyarakat<sup>83</sup>. Terlihat adanya aktivitas *halqah* intensif yang bertujuan untuk membina dengan melakukan pergolakan intelektual dan perjuangan politis. Aktivitas ini untuk memunculkan kader-kader

---

<sup>83</sup> Loc.Cit, Syabab Hizbut Tahrir. Hal 166

dakwah yang memiliki keperibadian yang berkarakter (dalam hal ini Islam). Logikanya, setelah pemikiran masyarakat dipenuhi dengan pemikiran Islam maka pola pikir dan pola sikapnya akan berkesinambungan yakni pola sikap Islami.

2. Dengan aktivitas seperti ini, pembinaan masyarakat secara umum atau kolektif (*Tsaqafah Jamaah*) dan pemikiran akan sangat mudah diterima. Forum diskusi seperti; pengajian umum, ceramah, dan balai pertemuan akan lebih sering diadakan. Untuk melengkapi kegiatan tersebut, Hizb juga menggunakan media yang sangat mendukung aktivitasnya antara lain; leaflet, buku, dan media masa. Alhasil, opini publik pun akan terbentuk yakni mengenai Islam dan mampu menentang kaum imperialis Barat.
3. Pergolakan Intelektual (*Ash-Shiraa Al-Fikri*), memperlihatkan kepalsuan dari sistem-sistem yang sudah diadopsi dari Barat bahwa tidak akan mampu mengatasi permasalahan dunia. Kemudian dikembalikan kepada hukum Islam.

4. Perjuangan Polits (*Al-Kifah as Siyasiy*), menentang segala bentuk penjajahan baik sistem, pemikiran, militer, ekonomi dan sebagainya, membongkar konspirasi serta propaganda, serta menghilangkan pemerintahan dengan sistem di luar sistem Islam.
5. Mengadopsi kemaslahatan umat (*Tabbani mashalih al-ummat*), dengan memelihara urusan umat sesuai hukum syara'.

Dalam menghadapi ide yang salah dan menyimpang dari Islam, menentang kelompok lain yang tidak berideologi Islam atau menghadapi negara kafir imperial dan penguasa, Hizb dengan terbuka dan terang-terangan dalam menyampaikan pendapatnya. Hizb berjuang secara politik tanpa melihat hasil yang akan dicapai dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada.

## **I. Finansial Hizbut Tahrir**

Organisasi ini didanai sepenuhnya oleh anggota-anggotanya dan Hizb tidak menerima segala bentuk bantuan dana

dari pemerintahan manapun. Karena perjuangan Hizbut Tahrir terfokus pada penyebaran pemikiran, maka biaya operasionalnya sangat minim, karena pemikiran tidak perlu biaya<sup>84</sup>. Sumber dana yang dimiliki oleh Hizb juga diperoleh dari kas bulanan dan infaq atas nama pribadi anggota untuk membiayai segala aktivitas Hizb baik dalam skala kecil maupun besar<sup>85</sup>. Ini menerangkan bahwa tidak ada lembaga atau sponsor khusus yang menaungi berbagai agenda Hizb. Juga, Hizb memproduksi buku mengenai pemikiran dan majalah mengenai isu-isu terkini melihat kondisi dan urgensi dari masyarakat yang harus diubah dan membutuhkan solusi akan permasalahan.

Pada awal pengembangan Hizb di Indonesia, Hizb membentuk sebuah Badan Wakaf As-Salam- BWAS (Asosiasi Wakaf As-Salam). Formasi ini bertepatan dengan perubahan nama Buletin Al-Islam menjadi As-Salam. Badan ini digunakan

---

<sup>84</sup>Situs resmi, *Tanya Jawab Seputar Hizbut Tahrir*, diambil dari <https://hizbut-tahrir.or.id/2010/11/18/tanya-jawab-seputar-hizbut-tahrir-1/> 26/11

<sup>85</sup> Loc.Cit hasil wawancara dengan Humas Jogja

untuk mengumpulkan dana dan donasi yang diperuntukkan untuk Hizb<sup>86</sup>.

## **J. Komitmen Hizbut Tahrir**

Hizb dalam struktural mempertahankan tiga level struktural keanggotaan<sup>87</sup>. Level ini memperlihatkan besaran komitmen anggota terhadap partai dan keinginannya untuk mendirikan *khilafah*. Level pertama adalah aktivis atau simpatisan Hizb. Aktivis ini masuk ke dalam *halaqah* dan diaanggap belajar di partai tetapi tidak sepenuhnya didoktrin untuk menjadi anggota secara penuh. Pada level ini, simpatisan memberikan sumber penting bagi Hizb. Biasanya, simpatisan bisa meningkatkan partisipasi publik pada agenda Hizb dan mendukung finansial Hizb. Level kedua, anggota yang telah mendalami pengetahuan partai dan sudah melakukan *baiat* (sumpah setia) terhadap partai. *Baiat* ini sangat penting untuk mengikat agen. *Baiat* (sumpah setia) adalah kontrak sosial

---

<sup>86</sup> Mohamed Nawab Mohamed Osman, *Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia* (Singapore: Journal 2009). Hal. 6

<sup>87</sup> Ibid, Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal. 9

pemimpin negara dengan masyarakat dan berjanji untuk mematuhi hukum Islam. Ini yang diadopsi oleh Hizb sebagai manifestasi untuk mengikat anggota dengan partai. Level ketiga, anggota mulai berada posisi penting di partai. Pada level ini membolehkan partai untuk menyaring dan menilai anggota untuk meyakinkan bahwa berkomitmen dalam memimpin partai.



### **BAB III**

## **PROBLEMATIKA SOSIAL, POLITIK DAN BUDAYA DI INDONESIA**

Perjalanan Hizbut Tahrir dalam menebar Islam ke seluruh penjuru tidak justru menemui jalan yang mulus. Sejak berdirinya pada tahun 1953 hingga saat ini, memang Hizb telah memberikan perhatian yang besar dari publik. Terlihat perkembangan Hizb yang sangat signifikan dan membuktikannya dengan tetap eksis serta bertambahnya jumlah keanggotaannya. Tetapi perjuangan tersebut belum sampai kepada titik akhir, banyak *problem* dan romantika yang harus dihadapi Hizb dalam mencapai keislaman dunia. Globalisasi dan sistem dunia telah menjadi tantangan besar bagi setiap lembaga yang menyuarakan Islam ke skala internasional.

Dalam bab ini penulis menerangkan kondisi sektor yang menjadi kunci peradaban sebuah negara yakni sosial, politik, dan budaya Indonesia saat ini. Sehingga pembaca mampu melihat urgensi pembaharuan atau perbaikan serta bisa menganalisa solusi apa yang menjadi alternatif pada kondisi tersebut.

## **A. Permasalahan di Sektor Sosial**

Masyarakat adalah subjek yang menghasilkan nilai ataupun realitas sosial di lingkungan. Interaksi antar individu masyarakat membentuk sebuah tindakan yang akan mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan di tempat individu tersebut tinggal. Persoalan di sektor sosial bisa dilihat dari subjek (masyarakat) dan kondisi kehidupan yang dijalani subjek tersebut. Faktor-faktor penentu kesejahteraan sosial biasanya ditentukan dari taraf hidup berkecukupan dari segi materi yakni ekonomi dan faktor penunjang lainnya yakni pendidikan, sumber daya alam, fasilitas dan infrastruktur. Sosial, politik dan budaya adalah sektor yang saling berkaitan satu sama lain yang akan menentukan kehidupan yang sejahtera dan menggambarkan negara yang baik.

### *1. Pendidikan*

Pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara regional lainnya di Asia Tenggara dibawah oleh Singapura bahkan Vietnam<sup>88</sup>. Padahal

---

<sup>88</sup> Mervyn Piesse, 2015, *Social and Demographic Issues in Indonesia*, Indian Ocean Research Program, Future Directions International Pty Ltd, Australia.

pendapatan GDP Vietnam 2/5 lebih rendah dibandingkan Indonesia. Potensi karir setelah sekolah, hanya 25 % pelajar Indonesia yang memiliki minimal standar dalam kemampuan menulis dan menghitung. Kompleksitas birokrasi dari sistem pendidikan yang dianggap mempersulit pendidikan di Indonesia.

Korupsi di Indonesia juga menjadi halangan utama untuk menjalankan fungsi semestinya sistem pendidikan<sup>89</sup>. Menurut *Indonesian Corruption Watch*, ada beberapa sekolah saja yang bebas akan sogokan, suapan dan penggelapan. Lembaga tersebut mengakui bahwa lebih dari 40% sekolah yang terkena kasus pendanaan karena korupsi.

Percobaan solusi secara parsial untuk memperbaiki standar pendidikan seperti program yang diajukan Jokowi sebagai Presiden RI dengan Kartu Indonesia Pintar pada November 2014. Pembebasan biaya dan pemberian beasiswa pendidikan pelajar yang kurang mampu untuk masuk ke perguruan tinggi. Memang alokasi dana dari pemerintah

---

diambil dari <http://www.futuredirections.org.au/publication/social-and-demographic-issues-in-indonesia/>

<sup>89</sup> Ibid, Mervyn Piesse.

untuk pendidikan dikeluarkan 20 %, tetapi ini tidak akan menutup kemungkinan terjadinya korupsi di sektor pendidikan.

## 2. *Ekonomi*

Situasi kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) pada tahun 2007<sup>90</sup>. Indonesia menduduki urutan 107 dari 177 negara di dunia. Kesejahteraan sosial adalah satu elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi tekanan multidimensi. Selama era kepemimpinan terpusat, penghapusan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Desentralisasi, kebijakan dan penguatan program diambil alih oleh pemerintah lokal dan pusat. Hubungan antara pemerintah lokal dan pusat tidak bertitik pada struktural tapi fungsional. Pemerintah lokal membutuhkan kemauan politik yang kuat dalam menentukan dan menerapkan program kesejahteraan sosial pada masyarakat. Untuk memperbaiki kehidupan sosial tidak hanya

---

<sup>90</sup> Edi Suharto, *Development of Social Welfare in Indonesia: Situation Analysis and General Issues*, Hlm.2

berfokus pada pendekatan kelompok tetapi juga individu, keluarga dan komunitas<sup>91</sup>.

Persoalan sosial di Indonesia berada pada permasalahan demografi. Perubahan demografi Indonesia berpotensi akan kontribusi berbagai isu sosial<sup>92</sup>. Isu sosial tersebut berkenaan dengan pendidikan, pekerjaan, distribusi kekayaan dan urbanisasi. Ketimpangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh faktor utama yakni ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Kemiskinan di Indonesia masih dalam taraf kritis dan perlu perhatian khusus dan peran negara dalam menanggulangi kasus ini.

Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif.<sup>93</sup> Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier

---

<sup>91</sup> Ibid, Edi Suharto. Hlm. 7

<sup>92</sup> Loc.Cit. Mervyn Piessse

<sup>93</sup> Hasil survey BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat / Welfare Indicators 2016: Perkembangan Kesejahteraan Rakyat Trend of Social Welfare*. Hlm. 160

menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas.

Arus globalisasi antar negara yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Tetapi dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia cenderung melambat, tidak terkecuali Indonesia<sup>94</sup>. Tahun 2015, ekonomi Indonesia tumbuh 4,10 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Kondisi ini terus berlangsung hingga triwulan II 2016. Perlambatan ekonomi yang terjadi berbeda dengan kondisi persentase penduduk miskin yang justru mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86 persen atau mencapai 28,01 juta orang. Dengan kondisi ekonomi yang

---

<sup>94</sup> Ibid, BPS

melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan.

**Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Pulau, 2014-2016<sup>95</sup>**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Sumatra	6 074,94	6 366,65	6 273,7	11,21	11,55	11,22
Jawa	15 511,99	15 453,41	14 971,86	10,83	10,68	10,23
Bali dan Nusa Tenggara	2 000,69	2 180,44	2132,55	14,42	15,47	14,96
Kalimantan	984,31	982,42	974,58	6,57	6,42	6,26
Sulawesi	2 155,50	2117,08	2113,16	11,71	11,32	11,17
Maluku dan Papua	1 552,58	1492,82	1539,53	23,15	22,04	22,09

---

<sup>95</sup> BPS-Statistics Indonesia. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel di atas masih memperlihatkan tingginya prosentase kemiskinan masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dua tahun terakhir.

### 3. *Pekerjaan (Tenaga Kerja)*

Saat ini, hampir dua juta penduduk Indonesia terlibat dalam pekerja buruh. Posisi ini bisa meningkatkan sebanyak 1% GDP Indonesia dengan kesediaan pekerjaan baru sekitar 200.000-300.000 lowongan pekerjaan tercipta<sup>96</sup>. Tetapi, akhir 2006 lebih dari 10% populasi Indonesia adalah pengangguran.

“Unemployment has been on a downward trend in recent years. As late as 2006, more than ten per cent of the population was unemployed; by 2014, that figure had fallen to 5.7 per cent. This decline was accompanied by relatively robust economic growth as Indonesia underwent a robust commodities boom. As the economy has experienced slower growth during 2015, it could begin to face greater pressure to maintain low rates of unemployment. Youth unemployment remains a concern, with 18.3 per cent of the population aged between 15 and 24 years unemployed in February 2015.”<sup>97</sup>

Walaupun sumber daya alam yang melimpah, tetapi pemerintah Indonesia tetap belum mampu menyediakan

---

<sup>96</sup> Loc.Cit, Mervyn Piesse. Baris 8

<sup>97</sup> Ibid, Mervyn Piesse. Baris 9



lapangan pekerjaan sekalipun tingkat prosentase pengangguran menurun dua tahun terakhir.

#### 4. *Pergaulan*

Liberalisme yang dianut Indonesia mempengaruhi perilaku masyarakat. Prinsip kebebasan yang ditawarkan demokrasi memunculkan beberapa aktivitas dan gerakan untuk mengekspresikannya. Seperti LGBT, asusila, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikologi dan lain sebagainya<sup>98</sup>. Geliat LGBT di Indonesia telah diawali sejak beberapa tahun silam, namun perkembangannya semakin signifikan terlihat pada tahun 2016. Hal ini adanya pernikahan sejenis yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia seperti Manado, Riau, Wonosobo, Lumajang dan lainnya. Dukungan terhadap komunitas ini terlihat diberikan kepada Jasa Konseling Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI).

Kasus kekerasan seksual, bisnis prostitusi, perceraian, tren *fashion* menandakan dampak globalisasi yang

---

<sup>98</sup> MHTI, booklet Risalah Akhir Tahun 2016 MHTI, pada Kongres Ibu Nasional KIN ke-4 di JEC, Yogyakarta. Hlm. 8-9

menghapus ruang gerak tanpa batas. Juga didukung oleh media informasi yang tren di kalangan masyarakat terutama remaja yang maniak terhadap media publikasi saat ini seperti *facebook, twitter, youtube* dan media sosial lainnya yang membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial (ancaman pornografi dan seksual) seperti kasus Awkarin, Anya dan perempuan lainnya yang merusak kehormatan perempuan<sup>99</sup>.

## **B. Permasalahan di Sektor Politik**

Permasalahan politik Indonesia saat ini seharusnya dilihat dari kebutuhan negara secara keseluruhan<sup>100</sup>. Ini berarti, pembangunan tidak sebatas dilihat dari sektor ekonomi saja tetapi pentingnya sektor yang lain (politik, sosial dan budaya). Perlu adanya pembangunan kembali akan kesadaran politik seperti yang diwariskan presiden Soekarno pada era komunis tahun 1965. Saat ini, kesadaran politik belum tersebar ke semua kalangan

---

<sup>99</sup> Ibid, MHTI. Hlm. 11

<sup>100</sup> Deliar Noer, *Indonesia's Contemporary Political Problems*, hal 306. Diambil dari <http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-08-03-1970/noer-indonesia-contemporary-political-problems.pdf>

dengan intensitas yang sama bahkan tidak sukses mempenetrasi kalangan bawah yakni masyarakat umum.

Para pengamat dan politisi menggambarkan perpolitikan Indonesia saat ini sebagai “tahun politik”.<sup>101</sup> Penyebutan tahun politik setidaknya menyiratkan dua hal yakni: pertama, politik dalam sistem demokrasi sekuler lebih didominasi oleh rebutan kekuasaan<sup>102</sup> di pentas pemilu baik sekedar untuk menjadi wakil rakyat di pusat maupun daerah ataupun menjadi presiden dan wakil presiden yang memang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Kedua, karena dalam sistem demokrasi politik lebih kental bernuansa rebutan kekuasaan. Demokrasi membuka lahan sebesar-besarnya bagi siapapun yang memiliki kekuatan untuk memenangi kontes politik (dalam hal pemilihan umum).

Menurut Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, ia mengatakan kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran di berbagai bidang tidak terlepas dari proses tahapan Pilihan Presiden (yang kemudian

---

<sup>101</sup>Majalah Al-Wa'ie, *Demokrasi Sistem Gagal*, diterbitkan pada Februari 2014

<sup>102</sup>Dijelaskan juga oleh Anonim, *Maraknya Kondisi Politik Indonesia di Kalangan Masyarakat*, Diambil dari <http://www.hargen.co.id/news/2016/01/maraknya-kondisi-politik-indonesia-di-kalangan-masyarakat> diposting pada 23 Januari 2016

disingkat Pilpres). Kualitas pilpres berbanding lurus dengan hasil dari bagaimana pemenang membentuk pemerintahan. Terlihat kebebasan yang ditawarkan demokrasi malah justru mengarahkan keadaan politik menjadi *chaos*, tetapi tidak mengembalikan kondisi yang anarki seperti pada era orde baru.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan bahwa proses politik di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan demokrasi. Hal ini karena lembaga politik di Indonesia tidak menegakkan identitas negara hukum. Bagian dari *Trias Politica* yakni lembaga eksekutif dan legislatif sebagai setir negara seharusnya menerapkan prinsip demokrasi secara utuh<sup>103</sup>. Hal ini menurunkan konsolidasi demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pada diskusi akhir tahun Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)<sup>104</sup>.

“Menurut dia, penurunan konsolidasi demokrasi terjadi karena beberapa hal, antara lain ketidakkonsistenan

---

<sup>103</sup>Anonim, *Saat Ini Politik Indonesia dalam Kondisi Cacat*, diambil dari <http://indonesian.irib.ir/international/asia-dan-pasifik/item/88565-saat-ini-politik>- diposting pada 26 November 2014

<sup>104</sup>Dina Ramadhani, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia dinilai Melemah*, diambil dari <http://nasional.sindonews.com/read/1166803/12/konsolidasi-demokrasi-indonesia-dinilai-melemah-1483009554> diposting pada 29 Desember 2016

lembaga legislatif pasca disahkannya Undang-undang tentang MPR, MD3 (Undang-undang yang mengatur kewenangan anggota MPR, DPD, DPR, dan DPRD).”

Deliar Noer mengategorikan permasalahan politik Indonesia sekarang menjadi tiga bahan diskusi yaitu: masalah demokrasi, masalah hubungan antar agama dan masalah hubungan sipil dan militer.

### *1. Masalah Demokrasi*

Faktor pendukung penerapan demokrasi melibatkan geografi, hukum adat, etnik, agama dan kepercayaan<sup>105</sup>. Faktor-faktor inilah yang akan membentuk pluralistik masyarakat. Faktor lain seperti musyawarah dan gotong royong juga membantu berkembangnya demokrasi. Kemudian faktor yang menghambat demokrasi termasuk pengaruh feodalisme yang membagi masyarakat menjadi dua kubu yaitu orang terpilih yang memiliki hak dan wewenang (ruler) juga masyarakat kalangan bawah yang tugasnya melayani (ruled). Juga kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis untuk dijadikan solusi dalam permasalahan hidup.

---

<sup>105</sup>Ibid, Deliar Noer. Hlm. 367

Demokrasi Indonesia di masa depan tergantung pada sikap, kebijakan dan usaha mengadakan kelompok politik, termasuk tuntutan senjata dan partai politik seperti pemerintah. Ini tergantung pada kepemimpinan pemerintah saat ini apakah kepemimpinan akan meningkatkan faktor membangun ketahanan apa tanpa disadari hal yang sebaliknya. Karakteristik Demokrasi Indonesia terkait dengan sistem pemilihan. Keputusan ataupun kebijakan diambil berdasarkan *mufakat* (kesepakatan). Tetapi perlu dipertanyakan apakah semua elemen sepenuhnya mendukung apakah sebagian dari mereka yang menyetujui kesepakatan tersebut<sup>106</sup>. Pemilihan saat ini tidak merefleksikan sistem yang dinamis. Ini maksudnya ada pihak yang merasa tidak diuntungkan dari kesepakatan atau pemilihan tersebut, sehingga adanya *status quo*.

Jaringan Pemuda untuk Demokrasi (Jardem) mencatat data yang di peroleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Februari 2014 sebanyak 318 kepala daerah dari total 524 kepala daerah seluruh Indonesia

---

<sup>106</sup> Ibid, Deliar Noer, Hlm. 369

tersangkut masalah korupsi. Jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur tujuh orang, Bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Sementara laporan Transparansi Internasional (TI) mengenai indeks persepsi korupsi global 2012 memberikan gambaran hubungan negatif demokrasi dan korupsi. Beberapa di antara 20 negara yang dianggap paling bersih dari korupsi (20 peringkat teratas), 19 adalah negara berkategori demokrasi<sup>107</sup>.

## 2. Masalah Hubungan antar Agama

Indonesia dianggap sebagai negara Muslim yang memiliki populasi 90 % beragama Islam<sup>108</sup>. Muslim di Indonesia dipengaruhi jejak animisme dan Hindu Budha yang telah meninggalkan kesan kebudayaannya. Begitu juga dengan Kristian. Dua dekade terakhir, hadirnya Hindhu dan Budha juga Kristen, Protestan, Katolik selama zaman

---

<sup>107</sup>Puji Kurniasari, *Politik uang menentukan Kualitas Demokrasi di Indonesia* diambil dari <http://nasional.sindonews.com/read/1162309/12/politik-uang-menentukan-kualitas-demokrasi-di-indonesia-1481520483> diposting pada 12 Desember 2016

<sup>108</sup> Ibid, Deliar Noer. Hlm. 369

kolonial Belanda memiliki hubungan yang dekat sesama agama, pengikut mereka bertambah apalagi sejak jatuhnya rezim komunis pada tahun 1965.

Tetapi, sekarang hubungan antar agama menjadi akut setelah adanya konsep pemisahan agama dan negara. Permasalahan sekuler dan keagamaan mulai terjadi sekitar tahun 1930an. Ini menarik bahwa nasionalis sekuler secara garis besar dianut oleh Muslim. Walaupun penerapan Pancasila menjadi solusi untuk menyatukan umat beragama di Indonesia, tetapi pengaruh sekuler nasionalis tidak bisa dilenyapkan. Pengaruh komunis di Indonesia sampai saat ini tidak bisa dihindari. Komunisme adalah agama dunia yang mungkin dibicarakan. Walaupun di Indonesia sudah dilarang, tetapi tidak menutup kemungkinan peran komunis berpotensi masuk dan berperan di Indonesia.

Sistem demokrasi yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia membuka gerbang yang luas akan kerjasama terhadap asing. Perusahaan multinasional, transnasional telah memenuhi jajaran kota. Mulai melakukan perusakan nilai-nilai kehidupan, hingga perang candu disebabkan oleh begitu



cantik dan potensialnya Indonesia sebagai sebuah negara. Indonesia hadir dengan konsep multi etnik yakni *Unity in Diversity* (Kesatuan dalam Keberagaman).<sup>109</sup> Menurut Samuel P. Huntington, dunia terbagi tidak lagi berdasarkan kepentingan politik tetapi kebudayaan.<sup>110</sup>

Kondisi Indonesia yang heterogen dan ini tersebar ke 6000 pulau yang tak berpenghuni. Indonesia merupakan salah satu negara paling plural dengan keberagaman dalam bahasa di dunia<sup>111</sup>. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia<sup>112</sup>. Pemerintah pada saat itu harus menghadapi persoalan “persatuan”. Dengan lebih dari 200 juta penduduk menggunakan 650 bahasa lokal diikuti 350 etnik. Juga memiliki bermacam agama besar dunia yakni Islam, Hindu, Konghucu, Budha dan Kristen.

---

<sup>109</sup>Anonim, *Multiculturalism: Some Lessons from Indonesia*, diambil dari Article copyright Cultural Survival, Inc. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/multiculturalism-some-lessons-indonesia> Dipost pada Juni 1994

<sup>110</sup>Ibid, Samuel, P. Huntington

<sup>111</sup> Jurnal *Helmut Lukas*, 2002, *The perception of Indonesia's history and culture by Western historians and social scientists*, Indonesian Embassy seminar in Brussels. Hlm.1

<sup>112</sup> Loc.Cit. Anonim. Baris ke-4

Sejak tahun 1998, kondisi mengarah kepada ketidakstabilan pertumbuhan dan anarki. Tidak dapat dipungkiri, sejak era reformasi tekanan etnik dan agama semakin meningkat dan sering terjadi konflik seperti konflik Maluku dan Kalimantan. Pendekatan primordial yang dianut etnik lokal memperkuat kesadaran akan kecintaan terhadap grup mereka sendiri sehingga menolak etnik lain yang tinggal di lingkungan tersebut. Grup yang lebih lama tinggal di lingkungan tersebut merasa memiliki tempat dan berkuasa di area tersebut.

Desentralisasi dan demokratisasi selama Era reformasi telah mengurangi peran dan kendali negara sehingga legalitas negara tidak mampu menahan meledaknya konflik etnik atau agama<sup>113</sup>. Seiring melebarnya konflik etnik hingga saat ini, Islam tumbuh dengan baik. Islam dari segala penjuru Indonesia bersatu dalam satu tempat untuk memperjuangkan agama Allah. Seperti yang terjadi pada bulan September 2016 kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Non Aktif Basuki Cahaya

---

<sup>113</sup> Op.Cit. Helmut Lukas. Hlm. 2

Purnama alias Ahok atas tuduhan penghinaan terhadap Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51.

Ia dikenakan sanksi hukum atas penghinaan terhadap kitab yang menjadi panduan bagi agama Islam. Pewarnaan kampanye politik dengan propaganda agama menjadi sangat sensitif dan alat politik dalam pencitraan. Ahok yang beragama Kristian dianggap melecehkan agama Islam yang secara riil penduduk terbanyak di Indonesia dan memposisikan diri sebagai agama mayoritas Indonesia<sup>114</sup>. Kemudian Ahok menjadi proses hukum dan penyidikan. Tetapi, penyidikan terhadap kasus ini terlihat lamban dan apatis. Umat Muslim di Indonesia kemudian bersatu untuk menanggapi kasus ini dengan melakukan Aksi Damai 1-III.

### *3. Masalah Hubungan Sipil-Militer*

Persoalan sipil dan militer berkuat pada masalah dual fungsi militer. Militer di Indonesia memiliki inkonsistensi dalam menjalankan fungsinya. Seemestinya militer menjalankan aktivitas peran militer tetapi sesudah itu, militer

---

<sup>114</sup>Anonim, *Social dan Demographic Issues in Indonesia*, diambil dari <http://www.futuredirections.org.au/publication/social-and-demographic-issues-in-indonesia/> baris 9

berperan sebagai orang sipil. Aktivitas ini dijalankan karena ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan pemerintahan. Memang hal ini adalah upaya penyeimbangan antara Masyumi (partai pertama) dengan PKI (partai Komunis Indonesia) yang diajukan presiden Soekarno sebelum era komunis. Kemudian pada tahun 1965, Komunis mencoba untuk memainkan peran lebih militer.

Sejarah masa lalu menentukan masa depan militer Indonesia ke depan. Banyak yang beranggapan, kejadian masa lalu adalah kelemahan partai politik. Seharusnya militer tidak terlibat dalam kehidupan sipil. Karena ini mematahkan peran sesungguhnya. Sipil tidak mendapatkan posisi kepemimpinan dan militer juga tidak mampu mengerahkan senjata. Untuk mencapai pembangunan, perlu adanya dukungan dari berbagai kalangan. Persatuan mengangkat sisi militer dalam berkomitmen untuk memainkan peran positif membangun politik.

Penulis merangkum permasalahan politik yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi dua hal, yaitu masalah korupsi, dan

peraturan (hukum)<sup>115</sup>. Korupsi yang terjadi di Indonesia memperlihatkan betapa lemahnya hukum di Indonesia. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan menjadi sebuah harapan ketika dukungan tersebut dilindungi oleh hukum. Sejak runtuhnya rezim Soeharto, desentralisasi menjadi kekuatan politik Indonesia.

“One of the major political reforms implemented in 2001 after the fall of President Suharto was the decentralization of political power in Indonesia. Instead of having all major economic, development and political decisions made in the capital, approximately 500 legislatures were created around the county. These district- and municipal-level governing bodies were empowered to make spending decisions on local projects.”<sup>116</sup>

Banyak analis yang menyatakan setuju akan adanya desentralisasi dan sukses secara politik. Tetapi, efek lainnya penyebaran korupsi semakin luas dari kota hingga pedalaman. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa otonomi daerah Indonesia memang membuat pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk memerintah dan

---

<sup>115</sup> Ibid, Deliar Noer. Hlm. 373

<sup>116</sup> Daniel Sagalyn, *Corruption Challenges Indonesia's Government*, diambil dari [http://www.pbs.org/newshour/updates/world-jan-june11-indonesia\\_05-26/](http://www.pbs.org/newshour/updates/world-jan-june11-indonesia_05-26/) (diposting pada 26 Mei 2011) pada 31 Desember 2016

mengalokasikan budgetnya sendiri tetapi, alhasil ini membuka ruang korupsi. Kondisi inilah yang menjadi tantangan pemerintah Indonesia sejak tumbanganya Soeharto. Tantangan nya bagi Indonesia bukan berasal dari ekstimis Muslim tetapi korupsi di dalam kelas politik. Staf pemerintahan Amerika mengatakan bahwa terdapat peluang besar melihat Indonesia sukses dan mempunyai sejumlah program untuk membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas memerintah dan meningkatkan pengaturan hukum.

### **C. Permasalahan di Sektor Budaya**

Era globalisasi dan modernisme yang menitikberatkan pada prinsip kebebasan, membuat lahirnya peradaban Indonesia mengarah pada ideologi atau kehidupan Barat<sup>117</sup>. Modernisasi di dalam masyarakat perlahan merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat yang menerapkan budaya Barat yang memiliki ciri gaya hidup hedonis. Fenomena masyarakat yang menggeser

---

<sup>117</sup> Teguh Imanto, *Krisis Budaya Nasional Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi* diambil dari <http://www.esaunggul.ac.id/article/krisis-budaya-nasional-indonesia-di-tengah-arus-globalisasi-2/>

kedudukan budaya lokal Indonesia meniru tren Barat dengan gaya hidup bebas baik dalam pergaulan, pakaian, dan bahasa.

“Pola ini memang sengaja dilakukan oleh para penguasa media yang melahirkan dan mempopulerkan pola hidup semacam itu lewat pengaruh produknya yang notabene sebagai cerminan kebudayaan lebih modern serta digembar-gemborkan melalui jejaring medianya yang telah mereka bangun sebelumnya, hingga masyarakat khususnya generasi muda terkena dampak dan bertekuk lutut meniru secara mentah-mentah tanpa adanya koreksi diri dari produk di balik tayangan medianya dari lansiran kaum kapitalis itu.”<sup>118</sup>

Fenomena di atas menunjukkan lunturnya budaya asal Indonesia yang terkenal memiliki norma kesopanan dan tata krama yang tinggi. Sekarang jati diri bangsa Indonesia diwarnai dengan kebudayaan seronok, perilaku yang rusak, dangkal pemikiran, berjiwa pragmatis, instan, konsumtif hingga hedonis. Ideologi Pancasila yang menjadi budaya leluhur tidak mampu menahan derasnya dampak globalisasi dan modernisme di Indonesia.

### *1. Lunturnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa*

---

<sup>118</sup> Ibid, Teguh Imanto.

Pancasila sebagai keperibadian bangsa Indonesia<sup>119</sup>. Karena Pancasila adalah produk dari proses interaksi masyarakat secara intensif sehingga membentuk sebuah nilai yang ini bisa dimaknai bersama dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Pancasila lahir sebagai antitesis terhadap suatu nilai sebelumnya yang dianggap tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia.

Realitas sosial yang tergambar bahwa masyarakat dalam situasi dan kondisi bangsa yang serba kompleks dengan segala permasalahannya menyebabkan masyarakat menerapkan pola pikir yang pragmatis hingga melahirkan pragdigma baru dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang kebenarannya sangat diragukan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap ideologi Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia<sup>120</sup>. Semangat yang dikembangkan untuk ideologi bangsa seharusnya memngarahkan pada terciptanya gagasan besar dalam menyikapi berbagai realitas masyarakat yang

---

<sup>119</sup> Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Surya Raya, Surabaya. Hal 28

<sup>120</sup> Op.Cit. Teguh Imanto.



heterogen. Hal ini memerlukan dukungan dari elit penguasa negara untuk memberikan perlindungan akan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan seperti masalah upah/gaji pendapatan yang tak berimbang dengan kebutuhan hidup, terbatasnya lapangan kerja, masalah energi, BBM yang tumpang tindih dengan berbagai kepentingan dan rendahnya mutu pelayanan publik pada masyarakat serta rasa keadilan yang tak pernah hinggap pada insan negeri ini menjadi pemicu atas rendahnya kualitas pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Kemerdekaan yang diraih tidak malah justru melepaskan bangsa Indonesia dari jeratan asing, tetapi malah memperkuat ikatan dan ketergantungan bangsa terhadap budayanya.

Kondisi bangsa sekarang justru mengalami keterpurukan begitu dalam hingga menimbulkan krisis nasional dalam skala multidimensi, Hal tersebut disebabkan oleh tingginya praktik-praktik Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) yang berimbas atas lahirnya garong-garong dalam segala situasi dan kondisi. Banyaknya maling-maling berskala besar di tingkat atas para elit politik dan pemegang

kekuasaan, merupakan wujud nyata dari pengingkaran dan penyimpangan atas ideologi bangsa serta tatanan hidup yang telah dilahirkan oleh para pendahulu bangsa ini.

Lunturnya jati diri ini, mengarahkan pada krisis moral karena esesinya Pancasila dan agama tidak bertentangan. Sebagai ideologi Pancasila, dituntut untuk tetap pada jati dirinya baik ke dalam (segi intrinsik) maupun ke luar (segi ekstrinsik)<sup>121</sup>. Maksudnya intrinsik, Pancasila harus konsisten, koheren, dan koresponden. Sedangkan ekstrinsik, Pancasila harus menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun vertikal.

## 2. *Kerjasama Pemerintah Lokal dengan Asing*

Membludaknya tenaga kerja asing, perusahaan multinasional dan masuknya produk luar negeri ke Indonesia merupakan ciri budaya ketergantungan Indonesia. Upaya diplomasi dalam bentuk kerjasama, ternyata membuka peluang bagi asing untuk mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, tenaga kerja Cina yang jumlahnya mencapai ribuan di Indonesia saat ini telah

---

<sup>121</sup> Op.Cit. Abdul Karim. Hlm 47

memenuhi lapangan pekerjaan yang seharusnya untuk masyarakat lokal. Alhasil, optimalisasi dan pendayagunaan masyarakat lokal dikurangi dan kebiasaan serta cara kerja di perusahaan lokal dibentuk oleh budaya asing. Kemudian hadirnya MNCs (perusahaan multinasional) juga memberikan dampak negatif bagi budaya asli Indonesia yakni budaya konsumsi yang dibawa perusahaan tersebut bisa mengubah budaya konsumsi konsumen lokal dan pada akhirnya mematikan unit-unit usaha tradisional<sup>122</sup>. Produk luar menjadi tolak ukur gengsi di kalangan masyarakat yang mengklaim penggunaan produk luar negeri menaikkan level strata masyarakat dan lebih diterima sebagai kalangan elit atau priyayi.

Stigma inilah yang perlahan dibentuk di dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan atau budaya tersendiri bagi masyarakat lokal. Alhasil, budaya asli yang ramah tergantikan dengan budaya gengsi dan tren yang berkiblat ke Barat.

---

<sup>122</sup> Donald Berbatov Silitonga, *Dampak Negatif Perusahaan Multinasional di Indonesia*, diambil dari <http://dokumen.tips/documents/dampak-negatif-perusahaan-multinasional-di-indonesia.html#> (6 Maret 2016)

### 3. *Demam Korea*

Drama Korea yang mulai *booming* (meledak) di kalangan anak muda sejak tahun 2002<sup>123</sup>. Kegilaan terhadap drama Korea menimbulkan istilah Demam Korea. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, hal ini disebut sebagai diplomasi kebudayaan. Maksudnya, menjadikan film Korea sebagai tren dan budaya bagi masyarakat global demi meningkatkan eksistensi negara di mata negara lain. alhasil, pemerintah Korea sangat sukses menjalankan misinya. Maniak drama Korea mampir di kalangan remaja Indonesia. Adegan romantis yang diperlihatkan dalam drama Korea ternyata masuk ke dalam karakter remaja dan anak muda Indonesia yang mudah terserang penyakit galau. Dampaknya, remaja dan anak muda banyak yang meniru dan menjadi penggemar fanatik gaya *boyband* dan *girlband* Korea ataupun pemain dalam drama Korea tersebut. Hal ini terjadi pada saat

---

<sup>123</sup> Majalah Cermin Wanita Shalehah, edisi perdana Februari 2012. Hlm 36 kategori remaja prestatif

artis Korea mengadakan konser ke Indonesia, penonton histeris dan artis begitu dielu-elukan<sup>124</sup>.

Diakhir, penulis mengutip dari pernyataan Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar menjelaskan, ada lima permasalahan bangsa saat ini, pertama potensi perkembangan dan kebangkitan komunis, kedua invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk sumber daya manusia. Ketiga potensi konflik antaretnis dan umat beragama, keempat lemahnya kedaulatan masyarakat Indonesia, dan kelima bergesernya pemahaman ideologi Pancasila.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Ibid, MCW. Hlm. 38

<sup>125</sup> Mohammad Atik Fajardin, *Sebelum Terlambat, Lima Masalah Bangsa Ini Harus Dituntaskan*, diambil dari <http://nasional.sindonews.com/read/1166263/12/sebelum-terlambat-lima-masalah-bangsa-ini-harus-dituntaskan-1482850432> diposting pada 27 Desember 2016

**BAB IV**

**UPAYA HIZBUT TAHRIR DALAM**

**MENGINTERNASIONALISASIKAN GAGASAN**

**KHILAFAH ISLAMİYAH KE INDONESIA**

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat bagi seluruh alam). Tentunya, sistem seperti inilah yang sangat dirindukan oleh umat yang memimpikan segala bentuk keadilan, kesejahteraan, keamanan, serta kedamaian. Tetapi kerinduan tersebut ternyata terlepas dari kehidupan umat saat ini. Sistem Internasional yang membelenggu, membuat umat menjadi terjebak, terpaksa bahkan terbuai dengan sistem yang ada. Tentunya, untuk mewujudkan kerinduan tersebut perlu adanya penyamaan persepsi antar umat yang ada di muka bumi ini. Yakni, kerinduan akan datangnya sistem Islam dan kembali tegak menaungi peradaban dunia seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah dan penerusnya *khulafaur Rasyidin* (pengganti Rasulullah). Kerinduan tersebut juga tidak akan terbentuk tanpa adanya kesadaran dari umat akan fenomena sistem yang bobrok saat ini dan memerlukan perubahan terhadapnya.

Kebangkitan dan kejayaan Islam adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Tetapi, ketika muncul pertanyaan “jika Islam memang akan bangkit, maka itu kapan? kemudian muncul lagi “jika Islam memang akan bangkit, maka seperti apa bangkitnya? kemudian jika Islam memang bangkit, bagaimana caranya?”. Lagi, jika Khilafah menjadi pemersatu umat, bagaimana caranya? Disinilah, Allah berkata”

“Berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu darinya.....”<sup>126</sup>.

Ayat ini menyampaikan untuk umat bersatu dalam satu kesatuan. Sehingga di ayat selanjutnya Allah menyerukan untuk membentuk kelompok<sup>127</sup> (al-jamaah). Inilah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir untuk melaksanakan kewajiban dan perintah Allah tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan yang muncul di atas

---

<sup>126</sup>Q.S Ali Imron ayat 103 tentang kesatuan

<sup>127</sup>Q.S Ali Imron ayat 104” Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru keadilan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

tersebut, Hizb merumuskan langkah atau upaya untuk mewujudkan bangkitnya Islam menjadi sistem peradaban dunia.

Dalam meraih tegaknya Khilafah Islamiyah, kelompok atau para pengemban dakwah mempunyai tugas yang sangat penting dan strategis. Yakni mengkaji secara cermat dan rinci apa yang terjadi di kalangan masyarakat sebagai jalan pembuka untuk mempengaruhi dan memperbaiki institusi pemerintahan. Dengan melakukan kajian-kajian seperti ini, pengemban dakwah mampu melakukan tata cara praktis dalam mereorganisasikan institusi yang terlibat di dalam administrasi pemerintahan. Sehingga, sistem Islam akan lebih mudah terwujud dalam menaungi negara.

Internasionalisasi adalah langkah fundamental dalam proses desain dan proses pengembangan (dalam hal ini ide Hizb ut-Tahrir)<sup>128</sup>. Ini berarti upaya dalam meningkatkan kapasitas lokal dan mengenalkan ide tersebut dalam skala lebih luas. Ide ini berawal dari pemikiran yang dihasilkan dari penggabungan sebuah fakta dan kondisi umat saat ini dengan sebuah informasi yang sudah ada sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah

---

<sup>128</sup>Richard Ishida, W3C, Susan K. Miller, Boeing, *Localization vs Internationalization*, diambil dari (<https://www.w3.org/International/questions/qa-i18n>, tanggal 12/Mei/2005)



pemikiran. Internasionalisasi berkaitan dengan internasionalisme yang merupakan kerangka kelembagaan dan informal dimana di dalamnya ada aktivis transnasional yang tertuju pada globalisasi<sup>129</sup>. Kerangka ini disediakan untuk melihat ancaman dan mengambil peluang yang ada. Begitu juga konstruktivis, norma dan identitas juga berpengaruh dalam membentuk perilaku domestik dan internasional.

Berbicara tentang teori konstruktivisme, ini bercerita tentang dua ide besar yang sebelumnya mempertahankan ide masing-masing untuk mencapai eksistensi. Mereka adalah idealisme dan realisme. Idealisme fokus dan mengakui akan pentingnya norma dalam mencapai peradaban dunia yang baik (*world order*). Realisme lebih cenderung terhadap pemenuhan kekuatan dengan peningkatan kapasitas agar mampu menguasai dunia dan ini sifatnya material. Kemudian, dalam konteks konstruktivisme, pendekatan ini hadir untuk menggabungkan kedua pemahaman tersebut. Karena sebuah norma tidak akan eksis jika norma tersebut tidak kemudian dikuatkan dengan

---

<sup>129</sup>Sidney Tarrow, 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press, Inggris. Hal 17

sesuatu yang mendorong norma tersebut. Dalam hal ini, penulis melihat ada upaya Hizb dalam menegakkan kembali Khilafah Islamiyah menjadi sistem pemerintahan dunia. Oleh karena itu ada hal yang harus dikuatkan dan *direcharge* oleh Hizb agar kompatibel dalam menghadapi segala tantangan dan mampu berkompetisi di dunia internasional. Ada proses timbal balik dan sangkut paut antara kedua elemen norma (ide) dan kapasitas sebuah kelompok agar idenya eksis dan mendapatkan tempatnya di area internasional. Konstruksi sosial memperlihatkan makna realitas, apa yang sudah menjadi kenyataan dan mana hal yang menjadi hasil konstruksi manusia.

Ide untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah berawal dari timbulnya kesadaran akan tidak mampunya sistem pengaturan dunia saat ini dalam mengatasi problematika hidup. Sehingga keinginan untuk merealisasi Khilafah Islamiyah merupakan ide yang dibentuk dari pengalaman adanya masa kekhilafahan terdahulu yang menjadi cerminan untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesadaran ini dibentuk dari interaksi masyarakat dan budaya sehingga menghasilkan sudut pandang bahwa Khilafah Islamiyah adalah sistem terbaik dalam mengatur

urusan dunia. apa yang dilakukan Hizb sejak tahun 1953 menyebarkan kesadaran tersebut melalui pemahaman umat dengan melakukak interaksi secara terus menerus antar masyarakat dan individu. Dimulai dari Palestina, kemudian ke Irak, Jordan dan Syiria berkembang di jazirah Arab. Ia melakukan eksodus ke Inggris, Amerika, Australia dan Jerman. Semenjak Uni Soviet tumbang pada 1991, anggota Hizb dari Inggris melakukan perjalanan ke Asia Tengah dan Kaukasus untuk menyebarkan ideologi hingga sampai ke Asia Tenggara<sup>130</sup>.

Partai politik Hizbut Tahrir bersifat Internasional<sup>131</sup>. Setiap negara memiliki representasinya. Wilayah pengembangan utama Hizb adalah negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan dan Kazakhstan. Di samping itu, wilayah pengembangannya kuat di Asia Selatan seperti Bangladesh dan Pakistan. Hizb masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970an<sup>132</sup>. Perkembangannya sangat lamban pada 10 tahun pertama dengan

---

<sup>130</sup> Jurnal Mohamed Nawab Mohamed Osman, beliau mewawancarai Maajid Nawaz, anggota pertama Hizbut Tahrir Britain. Hal. 3

<sup>131</sup>Anonim, *Penyebaran Hizbut Tahrir di Indonesia*, diambil dari [www.muslimedianews.com](http://www.muslimedianews.com) (4 Agustus 2014) pada 01 Januari 2017

<sup>132</sup> Mohamed Nawab Mohamed Osman, *Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia* (Singapore: Journal 2009 No.171). Hal. 8

aktivitas sebatas halaqah dan *liqo* (lingkaran kecil/ forum kajian). Hizb secara intensif berkembang di Indonesia tidak terlepas dari peran Mama Abdullah bin Nuh dan Abdurrahman Al-Baghdadi. Abdullah bin Nuh adalah seorang sarjana Islam yang memiliki banyak pengikut. Beliau mengajar di pesantren di Bogor, Indonesia pada 1982-1983. Kunjungan ini dalam rangka mengajar di salah satu pesantren di Bogor. Dari sini, beliau mulai menyebarkan ide melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus dan berdiaspora ke luar Bogor. Kemudian setelah 10 tahun kedua, perkembangannya sudah menyebar hampir ke semua provinsi di Indonesia. Beliau juga memiliki pengaruh di Australia yang pada saat kunjungan menjenguk anaknya yang kuliah di Sidney, membuka kesempatan anggota Hizb di Australia. Kemudian pada tahun 1982, beliau mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi mengajar di pesantren miliknya dan disinilah mulai Hizb menampakkan perannya.

Perjuangan Hizb dalam mengembangkan sayapnya tidak terlepas dari metode yang diadopsi dari Rasulullah SAW yakni kaderisasi, berinteraksi dengan umat, dan pengambilalihan kekuasaan. Saat ini, posisi Hizb di Indonesia sedang berada pada

tahap konsolidasi (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*) berinteraksi dengan umat dengan aktivitas *thalabun nusrah* ((mencari dukungan dan pertolongan). Fokus yang digunakan Hizb di Indonesia dengan mendekati politisi, pemegang kekuasaan, militer, tokoh agama dalam rangka mencapai revolusi damai.

Digelarnya, berbagai konferensi Khilafah di berbagai daerah adalah bentuk memproklamirkan ide atau aksi *show of force* (unjuk kapabilitas) Hizb di Indonesia. Hizb menolak untuk tidak tergabung dalam pemerintahan dengan alasan penerapan Islam secara *kaffah* (keseluruhan). Karena dengan terlibatnya ke dalam parlemen, ini berarti sama halnya dengan mendukung sistem atau hukum positif yang berlaku di negara Indonesia saat ini yakni sistem demokrasi (hasil dari ideologi Barat) dan sebagai Muslim kita wajib menolak nilai yang bukan berasal dari syariat Islam (Hukum Allah).

Hizb mengakui bahwa ideologi yang benar adalah hasil dari konstruksi agama Islam dan sistem yang sudah nyata berhasil diterapkan dan tentu berasal dari Islam adalah sistem *Khilafah Islamiyah 'ala minhajinnubuwwah*. Selama eksis di Indonesia, penyampaian ideologi Hizb ke publik sebatas paradigma kritik

dan penyampaian opini. Tetapi, walaupun tataran aktivitas Hizb hanya sebatas ini, pergerakannya sangat agresif dan mampu menarik ruang yang lebih besar dan perhatian dari publik.

Pergerakan Hizb di Timur Tengah berbeda dengan Hizb di Indonesia. Keadaan Timur Tengah yang panas, penuh dengan aksi perang membuat aktivitas Hizb bergerak secara *underground* (sembunyi/ di bawah tanah). Sedangkan pergerakan Hizb di Indonesia lebih luas dan terang-terangan. Tetapi, walaupun *uslub* (cara) yang dilakukan di setiap negara berbeda, Hizb memastikan menggunakan *fikrah* dan *thariqah* yang sama di segala penjuru. Sasaran dakwah di Indonesia memang diawali dari kampus yakni mahasiswa sebagai aktor intelektual. Sampai saat ini pun sasaran tersebut masih dilanjutkan bahkan berkembang ke seluruh kalangan.

#### **A. Obyektivikasi melalui Pemaknaan Ide Khilafah Islamiyah dari Berbagai Perspektif (Penyamaan Pemikiran)**

*Obyektivikasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif (interaksi antar anggota masyarakat) yang dilembagakan dan masyarakat sebagai objek akan terwujudnya

sebuah realitas. Proses ini merupakan langkah untuk membangun argument baru untuk menentang argument lama. Proses obyektif **Eksternalisasi** ini dilakukan melalui proses mencari makna dari ide Khilafah Islamiyah baik dari pemeran utama (dalam hal ini Hizb) maupun *second opinion* (pendapat lain). Dengan mengkonstruksi atau menilai relevansi ide Khilafah Islamiyah dalam konteks sosial, politik dan budaya saat ini. Sehingga akan ditemukan makna baru bahwa ide Khilafah Islamiyah kompatibel dijalankan di Indonesia.

Berbagai pendapat yang menyatakan bahwa *Khilafah Islamiyah* adalah mimpi yang keberadaannya hanya sebatas khayalan atau utopis. Alasan dan argumentasi dilontarkan untuk membuktikan bahwa gagasan ini tidak mampu mengikuti bahkan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ide mengenai *Khilafah* dibentuk dengan pengumpulan sumber akan urgensi pemerintahan yang baik dari segala perspektif. Input di bawah ini merupakan proses terbentuknya sebuah ide *khilafah* yang ini diklaim sebagai nilai subjektif kelompok (dalam konteks ini Hizb) dan bagaimana upaya Hizb mengembangkannya menjadi

sebuah opini publik dan diakui oleh masyarakat secara luas.

Istilah *khilafah* dari berbagai perspektif:

### 1. *Firman Allah SWT Q.S An-Nuur ayat 55*

Pada surah ini, menerangkan kekuasaan Muslim dalam menegakkan agama Allah yang ini dipimpin oleh seorang *khalifah*. Allah berfirman dalam surat An-Nuur ayat 55 yang berbunyi:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang telah beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sholeh bahwa dia akan sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Menurut tafsir Al-Qur'an Al-karim<sup>133</sup> ayat ini menunjukkan janji Allah terhadap orang beriman dan menjadikannya berkuasa di bumi. Mereka akan menjadi *khalifah*nya disana dan mengaturnya. Dia (khalifah)menjadikan

---

<sup>133</sup>Situs Resmi, *Tafsir Al-Qur'an Al-karim* diambil dari <http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-55-64.html>



Islam sebagai agama yang Allah ridhai dan menegakkan perintah agama serta syiarnya. Orang beriman tersebut berhasil menaklukkan negeri dari timur hingga Barat sampai kekuasaan dan keamanan tercapai dengan sempurna. Posisi *khalifah* di atas adalah sebagai pengganti, sesuai dengan penafsiran orang beriman akan menggantikan orang kafir.

## 2. *Hadits Riwayat Ahmad dan Al-Bazar*

Hadits ini menunjukkan periode atau masa yang sudah terjadi dan diakhiri dengan *khilafah*. Rasulullah SAW bersabda *dari Nu'man bin Basyir, ia berkata:*

“Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, –Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa’labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa’ad, apakah kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Nabi saw.” Hudzaifah berkata, “Nabi saw bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa ***Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah***; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika

berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa *Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah* (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam”.

Menilik hadits di atas, umat Islam saat ini sedang berada pada masa *mulkan jabbriyan*. Jika dirunut kejadian kepemimpinan dari era Muhammad hingga saat ini, bisa digambarkan dengan beberapa kepemimpinan yang sudah hadir dan ini sama halnya yang diterangkan oleh sunnah Rasul<sup>134</sup>.

“Dahulu politik Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku. Dan akan ada para khalifah lalu mereka menjadi banyak” Sahabat bertanya: “Lalu apakah perintahmu kepada kami?”, beliau menjawab: “Penuhilah baiat khalifah yang pertama, lalu khalifah yang pertama, dan berikanlah hak-haknya, sesungguhnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban dari mereka atas rakyatnya ”.<sup>135</sup>

#### a. *Periode Kenabian*

Kepemimpinan	Islam
dengan penerapannya di dalam syariat dimulai dari	era
Rasulullah memulainya dan berhasil mendirikan	negara Islam pertama di Madinah. Kekuasaan ini ia peroleh
dari hasil tahapan dakwah sembunyi-sembunyi (kalangan	

---

<sup>134</sup>[www.kiblat.net](http://www.kiblat.net)

<sup>135</sup>Hadits Riwayat Muslim

kerabat) kemudian terbuka (kaum Quraisy) dan hijrah ke Madinnah untuk menerima kekuasaan dari raja nasrani Habsyi yang telah ridho memberikan kekuasaannya kepada Rasulullah pada tahun 622 M/ 1 H. Kepemimpinan ini terjadi hingga 10 tahun berikutnya sampai 632 M. Menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan agama dan politik. Kemudian Rasulullah SAW wafat.

*b. Periode Kekhilafahan ala minhajnubuwwah*

Periode ini adalah periode *Khilafah* berdasarkan manhaj kenabian. Dikatakan *khilafah* karena tugas kepemimpinan digantikan oleh para shohabat Rasul yang kepemimpinan ini dipimpin oleh seorang Khalifah. *Khilafah* berarti pengganti (bukan menggantikan tugas tetapi mengalihkan fungsi administrasi ke para *khalifah*). Masa ini kepemimpinan *Khilafah* dimulai pada masa *Khulafaur Rasyid* dari khalifah Abu Bakar As-Sidiq (632-634 M/ 11-13 H), Umar bin Khattab (634-644 M/ 13-23 H), Utsman bin Affan (644-656 M/ 23-35 H), dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M/ 25-30 H).

*c. Periode Mulkan Aadhdhan (Penguasa yang Menggigit)*

Dilanjutkan masa Kekhilafahan Bani Umayyah (661-750 M). Yaitu setelah kepemimpinan Hasan bin Ali hingga runtuhnya Turki Utsmani (1924 M). Awal periode abad ke-20 adalah akhir dari periode *khilafah rasyidah* atau disebut dalam hadits adalah masa kerajaan<sup>136</sup>.

*d. Periode Mulkan Jabbriyayan (Penguasa yang memaksakan kehendak)*

Periode ini adalah masa kepemimpinan sejak runtuhnya Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 di Turki dan sejak itu Turki diakui sebagai negara merdeka dan negara berganti menjadi Republik yang menerapkan modernisme dari sistem sekuler. Di masa inilah yang terjadi, pengaruh ideologi selain Islam yang mencoba memisahkan peran agama dengan kehidupan dan lebih mengedepankan logis atau akal manusia sebagai penentu keputusan.

*e. Periode kembali ke Khilafah 'ala Minhajjubuwwah*

Setelah masa di atas *kekhilafahan* akan terwujud lagi. Melihat masa yang dijabarkan oleh hadits mencerminkan periode kepemimpinan yang sudah terjadi. Maka ada

---

<sup>136</sup>Majmu' al fatawa, 35/18

kemungkinan terjadinya *khilafah* yang menggunakan metode Rasulullah SAW di kemudian hari nanti.

Khilafah pada masa setelah meninggalnya Rasulullah SAW adalah bersifat *Rasyidah*, oleh karena kepemimpinan yang dijalankan menggunakan cara kenabian yakni lurus (basisnya Al-Qur'an dan Assunnah)<sup>137</sup>.

### 3. *Pandangan Empat Mazhab*

Pendapat 4 mazhab akan wajibnya Khilafah, disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman Al-Jazini yang menyatakan bahwa<sup>138</sup>:

“Para Imam mazhab yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad Hambali) rahimahumullah, telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu fardhu dan bahwa kaum Muslimin itu harus memiliki seorang imam (Khalifah) yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang didzalimi dari orang-orang yang dzalim. Mereka juga sepakat bahwa kaum Muslimin dalam waktu yang sama di seluruh dunia tidak boleh mempunyai dua imam baik keduanya sepakat atau bertentangan”.

---

<sup>137</sup>Op.Cit. Ahlussunnah Wal Jama’ah

<sup>138</sup>Loc.Cit, Felix Y Siau. Hal 204. Ini kutipan dari kitab Ibnu Hazm, Al-Fashlu fi Al Milal wal Ahwa’wan Nihal, Juz 4 Halaman 78.

#### 4. *Pandangan Pemikir Barat*

- a. Pada abad ke 20, pernyataan mengenai khilafah muncul dari pidato George W Bush pada tahun 2005<sup>139</sup> yang menyatakan bahwa;

“Para pasukan perlawanan bersenjata itu meyakini bahwa dengan menguasai satu negara saja, hal itu akan menghimpun seluruh kaum Muslim. Dimana hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan seluruh sistem di wilayah-wilayah itu dan mendirikan kerajaan fundamentalis Islam dari Spanyol hingga ke Indonesia”.

Pada tahun 2006, dia juga menyampaikan bahwa:

“khilafah ini akan menjadi imperium Islam totalitarian yang meliputi seluruh wilayah Muslim saat ini dan yang terdahulu, yang membentang dari Eropa sampai ke Afrika Utara, Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara”.

- b. Kemudian pernyataan juga dilanjutkan oleh Tony Blair pada tahun 2005, dia menyampaikan bahwa;

“Kita sesungguhnya sedang menghadapi sebuah gerakan yang bersaha melenyapkan negara Israel dan mengusir Barat dari dunia Islam serta menegakkan Daulah Islam tunggal yang akan menjadikan syariat Islam sebagai hukum dunia Islam melalui penegakan khilafah bagi segenap umat Islam.”<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup><https://www.youtube.com/watch?v=eSMUxtz1ZuY> Diterbitkan tanggal 14 Maret 2014 Video ini memberikan gambaran bahwa dunia barat percaya bahwa khilafah (caliphate) akan kembali hadir di tengah ummat

<sup>140</sup>Loc.Cit, Felix Y Siauw. Hal 208-213. Mengenai tanggapan Khilafah

Begitu juga dengan Charles Clark, Henri Kissinger, Allent West, Vladimir Putin, dan Phillip K Hitti yang sudah tidak asing mendengar *Khilafah* bahkan mengakui akan kemunculannya.

c. Mengutip dari buku *Khilafah "Remake"* yang menunjukkan pernyataan Phillip K Hitti dalam bukunya "History of the Arabs", bahwa:

"muncul sejumlah pandangan keliru yang menyatakan bahwa kekhilafahan semata-mata merupakan institusi keagamaan. Pandangan semacam itu kemungkinan hasil analogi salah kaprah terhadap kekuasaan imperium Suci Romawi dan perbedaan Kristen modern antara kekuasaan duniawi dan kekuasaan keagamaan. Padahal dalam pemerintahan Islam, istilah Amirul Mukminin pemimpin kaum beriman meniscayakan bahwa penguasa memiliki kekuasaan militer yang penuh. Pewarisan misi Muhammad (Khilafah) berarti pewarisan kedaulatan negara".

d. *Pandangan Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah)*

Dalam menganalisa makna *khilafah* dan urgensi pemerintahan Islam, Aswaja menggunakan analisa fiqh siyasi sebagai pendalaman makna secara definitif maupun terminologi.

"Dalam literatur fiqh siyasi konvensional, secara definitif, terminologi khilafah kerap dideskripsikan sebagai bentuk mobilitas umum berdasarkan asas-asas syar'i dalam

meraih kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Secara esensial, jabatan seorang khalifah dipandang sebagai pemegang otoritas religius dan otoritas politik.”<sup>141</sup>

Secara hukum, mengangkat imam (pemimpin) atau imamah (pemerintahan) sebagai figur dan lembaga pemegang otoritas adalah sebuah kewajiban agama. Dengan catatan, *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi pedoman yang kuat dan dilibatkan lebih sebagai justifikasi terhadap hukum dan melebihi konsensus (penetapan hukum berdasarkan kesepakatan para ulama). Menurut, Aswaja istilah *khilafah* merupakan konsensus umat (*ijma'*) terhadap urgensi pengangkatan imam dan pemerintahan. *Ijma'* tersebut berkaitan dengan *nashbul imamah* (mengangkat pemimpin), yang maksudnya bukan konsensus mengenai membentuk negara tertentu.

Pada kondisi mengangkat pemimpin cukup jelas merupakan perkara wajib menurut *ijma'* dan mencapai kata

---

<sup>141</sup> Anonim, *Khilafah dalam Perspektif Aswaja: Diskursus antara Idealisme dan Kemaslahatan*, diambil dari [http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/khilafah\\_aswaja.single?seemore=y](http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/khilafah_aswaja.single?seemore=y) disampaikan oleh Mudaimullah Azza, dalam Dialog Terbuka dengan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di kabupaten Bojonegoro, tanggal 3 April 2011



sepakat dari kalangan ulama. Tetapi, mengutip dari pernyataan

Aljuwaini dalam *Alghiyatsi*:

“bahkan menanggihkan kewajiban ini dengan kondisi yang mendukung dan memungkinkan. Ini sekaligus menandakan bahwa, kewajiban *nashbul imâm* tidak berlaku mutlak. Ada batas-batas kondisi tertentu di mana kewajiban ini tidak dibebankan.”<sup>142</sup>

Pernyataan di atas adanya kondisi perdebatan mengenai ada tidaknya dalil *qathi*(pasti) yang menyatakan kewajiban mengangkat pemimpin dan dalam tataran manifesto mendirikan *imamah* (benrtuk pemerintahan). Perwujudannya apakah dengan bentuk pendirian pemerintahan Islam konvensional (*khilafah*) dan ataukah penerapan konsep *imamah* pada wujud pemerintahan modern, seperti demokrasi.

Menurut *ahlussunnah wal jamaah*, untuk menganalisa hukum adanya *khilafah* bisa menjadi hukum publik atau diakui secara umum, hukum-hukum tersebut harus memenuhi dua syarat.

---

<sup>142</sup> Ibid, Pendapat Aswaja

1. *Syarat substansial*, menyangkut isi hukum yang harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
2. *Syarat prosedural*, artinya hukum itu dapat meyakinkan nalar publik untuk diterima melalui prosedur penetapan hukum secara demokratis yang juga disepakati oleh publik.

Artinya ada dua syarat yang berhak dipenuhi jika kelompok tertentu yang memiliki ide (dalam konteks ini *khilafah*) untuk mengisi bangunan negara sebagai hukum positif dan perundangan suatu negara. Tidak ada pengecualian dengan hukum yang basisnya agama. Bahkan untuk negara modern yang kini telah semakin represif, koruptif, eksploitatif dan tidak peduli dengan nasib masyarakat lemah, maka kontribusi agama-agama dengan kekayaan nilai-nilai etik dan moralnya sangatlah diperlukan.

Dari hasil penjabaran di atas, tidak menjadi suatu permasalahan dan tidak ada manfaat bagi umat Islam untuk mempermasalahkan persoalan sistem pemerintahan atau bentuk negara. Jika memang berkeinginan untuk memberikan

kontribusi kepada agama, maka bangunlah negara dan sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip kemaslahatan dan *rahmatan lil 'alamin*. Karena itulah manifesto esensial *khilafah* dalam pandangan Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah).

##### 5. *Pandangan Nahdatul Ulama*

Nahdhatul Ulama adalah salah satu organisasi besar di Indonesia yang mempunyai mayoritas massa di Indonesia. Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan pada 1-2 November 2014, memutuskan beberapa poin mengenai *khilafah* dan salah satunya adalah:<sup>143</sup>

“Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan

---

<sup>143</sup>Situs Resmi NU, *Khilafah dalam Pandangan NU* diambil dari [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (6 November 2014) pada 3 Januari 2017. Poin penting yang merupakan pandangan resmi NU terhadap khilafah sebagaimana telah ditetapkan sebagai hasil keputusan resmi Komisi Bahtsul Masail Al-Diniyah dalam Munas Alim Ulama NU 2014

membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.”

Nahdhatul Ulama tidak menafikkan akan kehadiran dan kemegahan Islam pada zamannya. *Khilafah* memang menjadi model yang sangat sesuai diterapkan sebelum model Negara-Bangsa dibentuk. Yaitu tepatnya pada era *khulafaur Rasyidin* (632-662 M) setelah wafatnya Rasulullah. Jika dengan kondisi Negara yang masih belum terpecah menjadi Negara-negara kecil, *khilafah* mungkin saja kembali. Tetapi, adanya pemimpin di sebuah Negara merupakan sebuah keharusan. Penerapan Islam di sebuah Negara saat ini tidak dalam bentuk formal sebuah sistem. Karena menurut NU, Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat memiliki kewenangan dalam mengatur dan memformulasi sistem pemerintahan sesuai dengan era dan perkembangan zaman bahkan tempat. Yang terpenting adalah pemerintahan harus bisa menjamin dan melindungi warga serta memastikan penerapan ajaran agama. Tidak hanya itu, juga menjadi tempat yang nyaman serta kondusif bagi terciptanya kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.

Sikap ini juga ditambahkan oleh mantan pengurus besar NU, KH. MA Sahal Mahfudh menyatakan<sup>144</sup>

“NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari’at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari’ah terimplementasi di dalam kehidupan masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari’ah di dalam masyarakat”.

#### 6. *Pendapat Para Ulama Klasik*

Ini gabungan pendapat dari ulama klasik mengenai *khilafah*<sup>145</sup>. Gabungan ini memperlihatkan pemikiran mengagumkan *ummah*, ulama terbaik melihat isu *khilafah sebagai* sesuatu yang kritis, mengacu pada kebutuhan penerapan *sharia* yang secara sederhana tidak bisa ditinggalkan. Ini pendapat Al-Ghazali. Pendapat Al-Amidi, dari keinginan terbesar Muslim dan pilar terbaik di dalam agama. Al-Qurtubi mengatakan bahwa *khilafah* sebagai pilar dari pilar Negara. Ibnu Taymiyya menyampaikan, ini salah satu kewajiban utama Negara.

---

<sup>144</sup> Lihat situs resmi NU di [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) sikap NU pada saat Khutbah Iftitah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006:

<sup>145</sup> Classical Scholars on Khilafah. Terlampir

Begitu halnya Al-Haskafi mengatakan *khilafah* adalah kewajiban yang sangat penting.

Pernyataan tersebut mengartikan bahwa keberadaan *khilafah* hal yang penting yang ini ada setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka menerangkan bahwa suatu hal yang berbahaya jika tidak memiliki *khilafah*, sesuatu yang telah terlihat, terlihat selanjutnya, pegangan pertama sejak kerusakan awal abda ke 20.

#### 7. *Pandangan Hizbut Tahrir*

Di dalam artikel yang diterbitkan oleh Hizb, Hizb menerjemahkan istilah *khilafah* berdasarkan pengertian asal dan syariah. *Khilafah* secara istilah merupakan mashdar dari fiil madhi *khalafa*. *Khalafa* yang artinya menggantikan atau menempati tempatnya<sup>146</sup>. Jadi, secara bahasa *khilafah* berarti orang yang menggantikan orang sebelumnya. Dalam pengertian syariah, *khilafah* digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan nabi SAW.

---

<sup>146</sup>Arief B Iskandar, *ApaItuKhilafah?*, diambildariafkar (al-waie) <https://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/apa-itu-khlafah/> (01 Oktober 2007)

Perspektif dan pendefinisian mengenai *khilafah* menurut para ulama yang dikutip oleh Hizb:

1. Khilafah adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya (Al-Qalqasyandi, *Ma'âtsir al-Inâfahfî Ma'âlim al-Khilâfah*, I/8).
2. Imamah (Khilafah) ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia (Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyah*, hlm. 3).
3. Khilafah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik ukhrawiyah maupun duniawiyah, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawiyah (Ibn Khladun *Al-Muqaddimah*, hlm. 166 & 190).
4. Imamah (Khilafah) adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia (Al-Juwaini, *Ghiyâts al-Umam*, hlm. 15).

Dari penjabaran di atas, Hizb menyimpulkan istilah *khilafah* diartikan sebagai kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim yang ada di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia<sup>147</sup>. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Hizb<sup>148</sup>, Hizb menjelaskan *khilafah* dalam konteks yang lebih luas dengan membandingkannya dengan kepemimpinan yang sudah ada.

Pertama, Hizb menjelaskan bahwa sistem *khilafah* bukan sistem monarki. Karena Islam tidak mengakui sistem kerajaan yang dalam kepemimpinannya menjalankan budaya pewarisan kekuasaan. Juga, pemimpin atau raja di sistem kerajaan memiliki hak khusus dan istimewa, memiliki wewenang di atas hukum dan raja memiliki jaminan kekebalan hukum. Pemilihan khalifah (pemimpin) dalam sistem *khilafah* berdasarkan kesepakatan dan ini dibai'at (diakui) oleh masyarakat secara langsung. Juga khalifah sebagai pelaku penerapan syariah yang itu posisinya di bawah hukum Allah.

---

<sup>147</sup>Ibid, situs resmi HTI dikutip dari *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, Qadhi an-Nabhani dan diperluas oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, Hizbut Tahrir, cet. VI [Mu'tamadah]. 2002 M/1422 H)

<sup>148</sup>Hizbut Tshrir, *Azhijah ad-Dawlah al-Khilâfah*, (Libanon: Beirut, 2005)



Kedua, Hizb menjelaskan *khilafah* bukanlah sistem kekaisaran (imperium). Pada sistem kekaisaran, hak istimewa diberikan pada pemerintahan pusat baik itu dari segi administrasi pemerintahan, harta, maupun perekonomian. Dalam sistem ini ada istilah yang disebut wilayah *periphery* dan *centris*. Maksudnya, pemerintahan pusat (sebagai wilayah *centris*) berhak mengeksploitasi wilayah pinggiran (*periphery*). Diterangkan lagi bahwa sistem ini mengenal istilah primordial yang menganggap kelompoknya tidak lebih baik dari pada kelompok lain. Khalifah atau pemimpin *khilafah* tidak memiliki otoritas penuh di atas syariah, jadi kedudukan *khalifah* sama halnya dengan masyarakat lainnya dan tidak memiliki hak istimewa.

Ketiga, *khilafah* bukan sistem federasi. Pada sistem ini, wilayah memiliki otoritas sendiri dan kemerdekaan serta dipersatukan dalam satu hukum umum. Beda halnya dengan sistem *khilafah* yang menjadikan kepemimpinan menjadi sistem kepemimpinan umum yang posisi negara tidak memiliki otoritas sendiri dalam memerintah tetapi dalam satu kepemimpinan *khalifah* yang mengadopsi Al-Qur'an dan As-sunnah.

Keempat, sistem *khilafah* bukan sistem republik. Pada sistem ini, kekuasaan berada pada tangan rakyat dan rakyatlah yang memiliki wewenang dalam menentukan hukum. Sistem yang dianut adalah sistem demokrasi yang mengatasnamakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan konsep *khilafah* yang ini mengadopsi dari hukum Allah SWT. Kekuasaan tertinggi berada pada tangan Allah SWT melalui (Al-Qur'an dan As-Sunah) sedangkan rakyat sebagai objek yang dikenai hukum tersebut dan wajib menjalankannya.

Dengan berbagai pandangan yang disebutkan di atas, obyektivikasi melalui penyamaan pemikiran dinilai cukup efektif. Karena sebuah ide dapat diterima dan diakui oleh publik ketika di tengah banyaknya golongan dan perspektif terhadap suatu ide bisa diambil poin yang ini memiliki tujuan sama. Sehingga terwujudlah sebuah keyakinan dan kepercayaan yang sama dan manifestasinya dibentuk dalam sebuah ide umum.

Dalam konteks ini, paradigma yang dihasilkan dari berbagai perspektif di atas terlihat adanya pembenaran terhadap penerapan nilai-nilai Islam dan hukum syariat. Inilah yang

akhirnya digabungkan sebagai legitimasi dalam penerapan sistem *khilafah* sebagai sistem formal yang diusung oleh Hizb. Banyak yang mengakui keberadaan *khilafah* di era berikutnya, dan suatu kewajiban dalam meraihnya. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa secara perlahan ide *khilafah* akan menjadi nilai bersama yang ini diakui oleh masyarakat internasional khususnya Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh SEM Institute (salah satu lembaga survey Indonesia) mengenai pengetahuan terhadap *khilafah* menyatakan masih rendahnya pengetahuan tentang ini tetapi tidak menutup besarnya yang memiliki pengetahuan tentang *khilafah* yakni prosentasenya lebih besar dibandingkan yang tidak mengetahui<sup>149</sup>.

## **B. Internalisasi melalui Sosialisasi Ide Khilafah Islamiyah dengan Pendekatan Pemikiran**

*Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. “*Man is a social product*”. Tahapan

---

<sup>149</sup>Terlampir

ini dilakukan dengan upaya sosialisasi/ terjun ke masyarakat sehingga terjadinya perubahan pengetahuan terhadap nilai atau kebiasaan tertentu yang ada di dalam masyarakat. Alhasil, proses obyektivikasi di tahapan awal dapat diintegalkan dalam pandangan dan pemikiran seseorang. Di tahap inilah individu ataupun kelompok mampu mensosialisasikan ide atau nilai baru ke dalam masyarakat dengan menanamkan kepercayaan kepada kelompok masyarakat baik dari kalangan yang berbasis Islam ataupun di luar kalangan berbasis Islam (menyeluruh).

Masyarakat internasional saat ini dipenuhi dengan masyarakat modern yang kondisinya lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil agama. Untuk itu, bagi individu maupun kelompok yang masuk ke dalam lingkungan tersebut harus berusaha mendalami kehendak masyarakat agar tercipta kehidupan dan hubungan harmonis di dalamnya. Begitu pula yang dilakukan oleh Hizb, agar mudah diterima oleh masyarakat Hizb mencoba mendalami pemahaman masyarakat dengan mengubah kesadarannya.

Pada pembahasan ini, penulis tidak mencoba untuk membenarkan maupun menyalahkan opini yang sudah tersebar di

kalangan masyarakat maupun kaum elit yang menguasai negara. Tetapi, penulis mencoba untuk mengajak pembaca dalam menganalisa sistem pemerintahan yang seperti apa yang mampu menjamin kesejahteraan semua kalangan dan apakah sistem tersebut sesuai dan cocok diterapkan pada skala internasional saat ini bahkan menjadi sistem peradaban dunia.

Pada tahapan internalisasi Hizb melakukan transfer pemikiran ke masyarakat. Sehingga ide Hizb dapat dipahami dengan baik dan juga ide Hizb dapat diterima oleh publik secara global. Dengan catatan, Hizb harus melihat kondisi masyarakat modern saat ini yang lebih mengedepankan akal. Dengan kata lain, implementasi ide Hizb juga harus berkorelasi dengan realitas, melihat fenomena yang ada. Maksudnya, dapat diindera oleh alat indera dan dijangkau oleh akal. Charles Taylor dalam bukunya “*Modern Social Imaginaries*” mengatakan dunia sedang membuat visi perbaikan yang lebih bermoral atau normatif. Ini merupakan respon dari dampak kondisi domestik dan internasional yang berantakan akibat perang agama<sup>150</sup>. Ditandai

---

<sup>150</sup> Charles Taylor, 2005, *Modern Social Imaginaries*, Duke University Press, United States. Hal 3

dengan teori Hukum Alam yang muncul. Charles mengutip pernyataan Grotius dalam bukunya bahwa kehidupan yang beraturan (normatif) mendasari politik sosial dari alamiah anggota masyarakatnya. Ia menjelaskan karakter dasar manusia bersifat rasional, agen mampu bersosialisasi dan berkolaborasi dalam menciptakan perdamaian serta kebaikan bersama. Ide yang bermoral menitikberatkan pada hak dan kewajiban individu terhadap orang lain.

Hizbut Tahrir adalah partai politik non parlemen yang sangat dekat dengan masyarakat. Karena seperti yang penulis jelaskan di bab sebelumnya mengenai konstruksi sosial, perubahan pemikiran dan pola sikap dimulai atau dipengaruhi oleh ide yang muncul di kalangan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu objek seruan Allah yang diterapkan oleh Hizb dalam menjalankan strategi pendirian khilafah. Hal inilah yang menjadikan Hizb unik dengan partai politik lain atau jamaah lain.

Pemikiran Hizb dapat dikatakan memiliki keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan upaya Hizb dalam menyuarakan *khilafah* ke tengah umat untuk menjadikannya sistem peradaban dunia. Keunikan tersebut dapat dilihat dari segi kompleksitas

dalam menerapkan sistem Islam di skala internasional. Ini bisa diamati dari logika berpikir Hizb dalam menganalisa kondisi masyarakat dan pendekatannya yang sangat halus.

Logika berpikir Hizb melalui dua metode pola pikir rasional dan ilmiah yang ini berkaitan dengan pemahaman terhadap fakta. Tiga hal yang dihasilkan dari proses berpikir tersebut yakni pemikiran, akal dan *idrak* (kesadaran)<sup>151</sup>. Ketiga hal tersebut memiliki makna yang sama yaitu pemindahan suatu fakta ke otak melalui panca indera yang dipadukan dengan pengetahuan (informasi) awal yang diperoleh sebelumnya hingga dapat menjelaskan fakta tersebut. Penggambaran keterkaitan empat komponen yang terlibat dalam proses berpikir<sup>152</sup>:

FAKTA → OTAK → diindera oleh PANCA INDERA + INFORMASI SEBELUMNYA → penamaan FAKTA
--

Pola pikir rasional adalah cara yang digunakan untuk memahami sesuatu dengan proses berpikir. Disinilah proses optimalisasi akal hingga sampai ke tingkat pemikiran atau disebut

---

<sup>151</sup> Ibid, Hizbut Tahrir. Hal 70

<sup>152</sup> Materi halaqah mengenai dasar pemikiran manusia, menelaah buku yang ditawarkan Hizbut Tahrir dengan salah satu anggota HTI chapter kampus

sebagai metode berpikir. Metode ini digunakan sebagai tahapan dalam memahami hakekat sesuatu yang sedang diamati dan dikaji melalui penginderaan atas fakta. Pada metode ini, kita mampu mengetahui hakekat terhadap sesuatu. Jangkauan metode ini dapat mengetahui objek yang dapat diindra dengan panca indera.

Pola pikir ilmiah adalah cara yang digunakan untuk memahami sesuatu dengan melakukan percobaan ilmiah. Metode ini dilakukan tidak dalam jangkauan meneliti hal yang abstrak (seperti pemikiran) tetapi bersifat empiris dan analisa laboratorium. Sehingga hasilnya pun juga bersifat dinamis dan sesuai dengan paradigma peneliti objek tersebut dan mengarah kepada kesimpulan. Alhasil, metode ini dapat menyimpulkan sebuah dugaan dan hal yang tidak pasti.

Proses berpikir tersebut adalah metode yang berkaitan dengan masyarakat, terikat dengan pemikiran, perasaan, dan sistem (aturan) yang sama. Di dalamnya terdapat interaksi antar individu. Tidak hanya keberadaan individu, dan sekelompok individu tapi juga adanya interaksi. Maksudnya, di dalam masyarakat terdapat sekumpulan individu, pemikiran, perasaan dan sistem (aturan). Maka dari itu, proses perbaikan di mulai dari



masyarakat itu sendiri untuk mengetahui apapun yang menyangkut perihal kebaikan negara.

Pada tahapan internalisasi, yang menjadi fokus Hizb adalah berinteraksi dengan umat. Tahap ini adalah posisi atau langkah terbuka yang dilakukan Hizb untuk menyampaikan risalah Islam lebih luas lagi. Visi yang akan dikembangkan Hizb yaitu merevolusi pandangan masyarakat, kesadaran, membentuk opini umum masyarakat terhadap ide dan hukum yang dipakai Hizb. Alhasil, mereka akan menggunakan ide dan hukum tersebut sebagai pemikiran mereka. Proses penyadarannya dengan menanamkan pemahaman, standar perbuatan dan keyakinan atau kepercayaan Islam di tengah umat.

Dalam mensosialisasikan ide *Khilafah*, langkah dakwah yang dilakukan Hizb adalah dengan seminar, diskusi, konferensi, muktamar, masirah (unjuk pemikiran), temu tokoh, konferensi pers, pelatihan, kunjungan atau audiensi yang sifatnya insidental ataupun rutin seperti pembinaan dan pengkaderan. Agenda tersebut adalah pendekatan pemikiran terhadap masyarakat<sup>153</sup>.

---

<sup>153</sup> Kaleidoskop dan galeri kegiatan dilampirkan di bagian belakang akhir naskah (lampiran)

Di Indonesia, Hizb melakukan beragam dinamika dakwah. Hizb mulai lebih terbuka sejak tumbangnya era orde baru yang ini perkembangannya mencapai ke seluruh pelosok negeri. Pada tahun 2000, Hizb juga mengorganisasikan pengadaan konferensi *khilafah Internasional* ke-1 ke wilayah publik. Konferensi ini diadakan di Jakarta dengan dihadiri 5000 aktivis Hizb<sup>154</sup> dengan pembicara Sheikh Ismail al-Wahwah (Hizbut Tahrir Australia), Ustadz Sharifuddin Md Zain (Hizbut Tahrir Malaysia) and Muhammad al-Khaththath. Agenda ini menerima ulasan yang luas dari media dan mentransformasi Hizb dari pergerakan elit yang cenderung pasif menuju organisasi masyarakat yang luas dengan pandangan dinamis.

Pada akhir 2011, MHTI mengadakan Konferensi Intelektual Muslimah dengan tema "Catatan Intelektual Muslimah untuk Bangsa: Sistem Pendidikan Pragmatis sebagai Faktor Pendorong Esensial Rusaknya Kualitas Generasi". Agenda ini menghadirkan para pemikir dan intelektual yang memberikan

---

<sup>154</sup> Hasil Interview Osman dengan Dr Sharifuddin Md Zain, Hizbut Tahrir Malaysia leader, 2nd August 2006, Malacca. Lihat Jurnal Mohamed Nawab Mohamed Osman, *Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia* (Singapore: Journal 2009).

orasinya. Juga diikuti oleh berbagai peserta dari 350 aktivis Islam dari berbagai kampus ternama di Indonesia (ITB, UI, UNAIR, UGM) yang hadir memberikan testimoni.<sup>155</sup>

Pada tahun 2012, Muslimah Hizbut Tahrir dari seluruh dunia melakukan kampanye global yang berpuncak dalam Konferensi Perempuan Internasional bersejarah di Tunisia dengan judul “Khilafah: Model cemerlang bagi Hak-hak dan Peran Politik Perempuan. Konferensi ini adalah satu-satunya terbesar di wilayah Arab sejak jatuhnya penguasa diktator mereka. Hadir 1000 orang peserta dari seluruh dunia yang terdiri dari politisi, penulis, akademisi, wartawan, guru, tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi. Di Indonesia juga diadakan kampanye Global dalam Konferensi Perempuan Internasional tahun 2012, dihadiri 1500 tokoh perempuan dengan pembicara dari Asia Tenggara, Eropa, Afrika, Asia dan Dunia Arab.

Pada tahun 2013, di 31 kota besar di Indonesia Hizb melakukan “*Muktamar Khilafah*” yang melibatkan banyak orang sekitar 360 ribu orang. Selain itu aktualisasi diri Hizb juga melakukan banyak kegiatan dalam merespon persoalan aktual

---

<sup>155</sup> Galeri Foto Kegiatan MHTI di Majalah Cermin Wanita Shalihah

seperti RUU Ormas, Miss World, penyadapan oleh Australia dan AS dan agenda lainnya. Juga ada *Jakarta Internasional Conference of Muslim Intellectuals (JICMI) 2013* yang dihadiri oleh 2000 profesor, doktor dan master dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan partisipan dari Malaysia, Jepang, Australia, Inggris dan Libanon<sup>156</sup>. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran umat tentang arti pentingnya Khilafah bagi perwujudan kembali *izzul Islam wal muslimin*. Dalam konferensi ini terdapat respon positif dari berbagai kalangan akan pentingnya Khilafah. Semua peserta mengacungkan pena memekikkan yel-yel yang bertuliskan “*intellectual awakening for khilafah*”.

Kongres Ibu Nusantara (KIN) yang diadakan setiap tahun oleh Hizbut Tahrir. Pada 17-25 Desember 2016, KIN sudah memasuki tahun ke-4 yang ini dijadikan sebagai risalah akhir tahun<sup>157</sup>. Kongres ini adalah aktivitas pemahaman dan proses penyadaran masyarakat yang dilaksanakan oleh Muslimah Hizbut

---

<sup>156</sup>Majalah Al-Wai'e, *Terpuruk di Semua Lini* (refleksi akhir tahun 2013)

<sup>157</sup> MHTI, *MHTI gelar KIN ke-4 bertema “Negara soko guru ketahanan keluarga”* diambil dari <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/12/27/mhti-gelar-kin-ke-4-bertema-negara-soko-guru-ketahanan-keluarga/> (27 Dec 2016)

Tahrir Indonesia (MHTI) diperuntukkan kepada para Ibu dan calon ibu yang ada di seluruh Indonesia dari berbagai profesi (mahasiswa, ibu rumah tangga, akademisi, jurnalis, penulis, pegawai dan lainnya). Dengan mengusung tema “Negara Soko Guru Ketahanan Keluarga” dimaksudkan para ibu memahami pentingnya peran negara dalam mengatasi problem yang ada pada keluarga. Agenda ini juga mendorong para ibu untuk peduli terhadap keadaan umat dan sebagai bukti peran perempuan tidak hanya di dalam keluarga tetapi pencetak generasi cemerlang dan pembentuk peradaban. Empat tahun terakhir, agenda KIN mengalami peningkatan kehadiran peserta dan pengembangan pengadaan agenda ini<sup>158</sup>. Yakni pada tahun ke-1, KIN diadakan di 30 kota di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta 15.000 orang; tahun ke-2, KIN berkembang diselenggarakan di 50 kota di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta lebih dari 20.000 orang; tahun ke-3 KIN diadakan di 59 kota dengan peserta lebih dari 30.000 orang, KIN terakhir diadakan di 83 kota/ kabupaten se-Indonesia.

---

<sup>158</sup> Berpartisipasi langsung dalam agenda KIN ke-4 pada 18 Desember 2016 dan mewawancari DPP MHTI ibu Pratma

Pada tahun 2016 juga, Hizb membentuk *Muslim Youth Movement (MY Movement) 2016* adalah sebuah titik awal untuk mengajak kaum muda bersama-sama berperan aktif menyiapkan diri dan mengikutsertakan kaum muda lainnya untuk mewujudkan cita-cita sebagai pemimpin di masa datang<sup>159</sup>. MY Movement sebuah event yang dipersiapkan untuk kaum muda, khususnya pelajar-pelajar muslim untuk berubah, bergerak, dan *move on* (bangkit) sebagai seorang pemuda sekaligus seorang muslim. Rangkaian acara yang berisi inspirasi dari mulai sinema, training, hingga talkshow, yang diperankan, diisi dan diselenggarakan oleh kaum muda juga. Tema yang diusung pada agenda ini adalah “ The Real Muslim Style” yang diselenggarakan di lebih 60 kota besar di seluruh Indonesia dan diikuti ribuan generasi muda.

Tidak hanya itu, aktivitas Hizb hampir menyeluruh ke segala bidang<sup>160</sup> seperti *Dauroh Dirasah Syar’iyah Ammah* (Program pelatihan Hizb) yang ini diadakan di daerah di

---

<sup>159</sup> HTI, *Agenda MY Movement 2016*, diambil dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/11/12/agenda-my-movement-2016-the-real-muslim-style/> (12 November 2016)

<sup>160</sup> HTI, *Liputan Kegiatan Hizbut Tahrir* diambil dari [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)

Indonesia dan partisipannya terdiri dari para tokoh, masyarakat, ulama dan para intelektual; *Masiroh* (Aksi Damai), sebagai agenda terbuka yang dilakukan Hizb di lapangan sebagai aksi damai untuk menunjukkan kepedulian umat Islam terhadap fenomena dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penistaan agama oleh Ahok (Gubernur Non Aktif Jakarta) pada September 2016, Hizb andil dalam Aksi Damai I-III untuk menolak pemimpin non Muslim dan penjarakan Ahok; *Dauroh Islam Rahmatan lil Alamin* (agenda pelatihan lainnya) yang menjelaskan pentingnya penerapan Syariat Islam didalam kehidupan bernegara dan akan terjadi kerusakan bila suatu negeri tidak menerapkan Syariat Islam secara kaffah; *Sarahsehan Islam Rahmatan lil Alamin* dengantujuan untuk menyadarkan umat agar sadar terhadap bahaya yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, hanya dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan maka negeri ini bisa diselamatkan; *Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat; Forum Tokoh; Halqoh Islam dan Peradaban (HIP)* adalah agenda bulanan Hizb yang diadakan di seluruh Indonesia; *Dauroh Remaja Muslim; Halqah Tokoh Umat; Mudzakah Tokoh dan Ulama; Focus Group Discussion (FGD); Liqo*

*Ulamadengan pembahasan kitab syekh Taqiyyuddin An-Nabhani yang dihadiri oleh (mubaligh, tokoh, ulama); Audiensi dilakukan kepada lembaga, komunitas dan partai baik di pemerintahan maupun institusi pendidikan; Agenda Temu Ramah yang bertujuan sebagai wadah koordinasi dan aspirasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kamtibmas kota agar lebih kondusif; Kunjungan Dakwah; Halal Bil Halal; LiqaSyawal; Multaqo 'Ulama yang tujuannya mempererat tali silaturahmi dan menyamakan tujuan perjuangan dakwah Ulama; Daurah Eksekutif Pengusaha sebagai wadah pelatihan bagi para pengusaha dengan mengenalkan prinsip ekonomi Islam yang menerapkan nilai-nilai syariah di dalamnya; Mukhtamar Tokoh Umat, Kampanye Syariah dan Khilafah/ talkshow dan banyak aktivitas publik lainnya.*

Di setiap agenda besar Hizb seperti Mukhtamar, Konferensi dan Kongres terus diadakan survey secara langsung terhadap peserta yang hadir dalam agenda tersebut<sup>161</sup>. Survey ini mengenai *awareness of khilafah* yang tujuan akhir

---

<sup>161</sup> Partisipasi penulis pada keagendaaan HTI baik *halaqah*, forum diskusi, open house, konferensi, mukhtamar dan lainnya sejak tahun 2011-2016



memperlihatkan pengetahuan peserta terhadap ide *khilafah*. Survey ini dilakukan di awal dan di akhir agenda. Hasil yang diperoleh juga langsung dihitung oleh tim *surveyor* di agenda tersebut. Prosentase kepedulian dan pengetahuan terhadap *khilafah* dan diterapkannya syariat Islam rata-rata 40-60%<sup>162</sup>. Semangat dan energi positif yang diberikan pada setiap agenda memberikan emosi tersendiri bagi peserta yang datang dan memberikan perhatian terhadap istilah *khilafah*. Peserta diajak berpikir dengan melihat kondisi sosial yang memburuk. Sehingga, ini mengarahkan peserta untuk menerima solusi terbaik yakni penerapan *khilafah*.

Melalui seminar, bincang publik, konferensi dan aktivitas lainnya, Hizb mengajak publik untuk ikut serta dalam menyuarakan Islam dan *khilafah*<sup>163</sup>. Hizb menggunakan forum atau seminar untuk mendapatkan pembicara yang diundang dan mendukung posisi mereka dalam pelaksanaan Syariah dan kebangkitan Khilafah di Indonesia. Dalam forum-forum tersebut

---

<sup>162</sup> Partisipasi penulis pada keagendaaan HTI baik *halaqah*, forum diskusi, open house, konferensi, muktamar dan lainnya sejak tahun 2011-2016

<sup>163</sup> Wawancara dengan Humas Regional Yogyakarta di Yogyakarta 17 November 2016

juga mengundang politik atau tokoh agama yang tidak setuju dengan pandangan mereka tentang agama dan politik untuk berdebat dengan Hizb<sup>164</sup>. Juga mengundang politik atau tokoh agama yang tidak setuju dengan pandangan mereka tentang agama dan politik untuk berdebat dengan mereka terhadap isu. ini Tujuan dari seminar dan pembicaraan yang untuk memperkenalkan ke segmen masyarakat Indonesia terhadap ide-ide dari Hizb dan memenangkan mereka. Selain itu pada konferensi dan forum tertentu, partisipan asing diundang untuk berbicara. Melalui undangan-undangan tersebut, Hizb melakukan pendekatan terhadap publik.

Bagian menarik dari partai, Hizb juga aktif dalam aksi demonstrasi dan *masiroh* (unjuk rasa) sejak tahun 2000<sup>165</sup>. Aktivitas ini untuk menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia dan menciptakan kesadaran tentang ideologi Hizb. Aktivitas ini dilakukan dengan sangat hati-hati, terencana dan isu-isu yang diangkat berkaitan dengan politik atau politik dari negara-negara Muslim Indonesia. Misalnya, pada Februari 2002,

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan Humas Regional Yogyakarta di Yogyakarta 17 November 2016

<sup>165</sup> Loc.Cit. Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal 16-17

Hizb menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Singapura, setelah itu Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, menuduh Indonesia sebagai sarang aksi teror. Aksi yang dilakukan Hizb cenderung sebagai penentangan terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap sebagai mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara negatif<sup>166</sup>. Pada bulan Maret 2005, demonstrasi Hizb menentang kenaikan yang diusulkan dalam bahan bakar prices. Aksi ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas dengan umat Islam di daerah konflik di dunia. Isu yang dipilih sebagai penyadaran umat akan pentingnya *khilafah* sebagai solusi terbaik. Pada Maret 2006, Hizb juga menyelenggarakan pawai dengan masyarakat sekitar yang aksi ini mengingat jatuhnya kekhalifahan terakhir di Turki. Lebih dari dua puluh ribu anggota berunjuk rasa di kota-kota Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang dan Makassar<sup>167</sup>.

Demonstrasi ini penting sebagai media dalam mendapatkan akses ke dalam masyarakat Muslim di Indonesia

---

<sup>166</sup> Ibid. Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal 16-17

<sup>167</sup> Ibid, Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal 16-17

yang mungkin tidak cenderung terhadap ide-ide Hizb, tetapi mungkin mendukung beberapa masalah yang dikemukakan oleh Hizb dalam aksi demonstrasi tersebut. Muslim tersebut berpotensi direkrut untuk menjadi anggota Hizb. Kemudian ini menjadi penting, demonstrasi ini membantu mendorong Hizb sebagai partai politik yang dekat dengan hati umat Islam di Indonesia karena mengangkat isu sosial-politik terkini. Selain itu, demonstrasi publik digunakan sebagai *platform* oleh para pemimpin Hizb untuk menciptakan aura kekuatan dan kekuasaan sekitar partai dan proyek kekuasaan mereka.

Beginilah cara yang dilakukan Hizb dalam mensosialisasikan idenya ke dalam perilaku masyarakat. Dengan berbagai aktivitas yang dibentuk dan diselenggarakan Hizb, makin banyak aktivitas terbentuk lainnya karena respon positif dari masyarakat mengenai ide yang ditawarkan oleh Hizb sebagai solusi dalam pemecahan masalah yang ada di Indonesia. Dengan pembagian target dalam berbagai aktivitas dakwah tersebut menjadi; Organisasi Mahasiswa (Lembaga Dakwah Kampus), Perempuan, Non Muslim, Membangun jaringan *nusroh* (dukungan politik dari kalangan yang memiliki pengaruh penting

seperti penguasa, pejabat, politisi, polisi, militer, figur publik), dan Organisasi Muslim.

### **C. Eksternalisasi melalui Media Publikasi**

*Eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. “*Society is a human product*”. Proses ini dilakukan agar suatu nilai tertentu berubah menjadi sebuah pilihan bagaimana bertindak maupun berperilaku sehingga perubahan dan nilai baru dapat dibaca dan dipahami oleh pihak lain. Tahapan ini jika dilihat dalam konteks publik terlihat adanya produk kebijakan sebagai solusi permasalahan. Eksternalisasi dalam konstruksi ide Khilafah Islamiyah melalui penggunaan media publikasi yang saat ini menjadi sorotan dan pegangan publik dalam menerima informasi.

Keadaan sosio-kultural masyarakat Indonesia saat ini tidak terlepas dari sosial media. Sosial media adalah teknologi penyebaran informasi dan jaringan yang sangat dibutuhkan dalam era modern. Kebiasaan masyarakat tidak terlepas dari peran sosial media baik penyebaran informasi, eksistensi, mencari jaringan maupun bisnis. Ini dimanfaatkan Hizb dalam mensporadis ide

dengan jangkauan tanpa batas. Bahasa dan penggunaan media komunikasi global menjadi sarana penting untuk memperkenalkan Khilafah di skala Internasional. Pemanfaatan produk globalisasi dalam penyebaran informasi adalah upaya Hizb untuk masuk ke dalam kebiasaan masyarakat dengan misi penyebaran ide *khilafah*.

Abad ini sering disebut sebagai Abad Komunikasi<sup>168</sup> yang kemajuannya sangat luar biasa di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Terutama internet, telah mempengaruhi sebagian besar pola kehidupan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pengguna internet melebihi angka 50 juta orang di Indonesia (setelah Cina, AS, India, Jepang, Brazil, Rusia, Jerman)<sup>169</sup>. Sosial media yang digunakan adalah Facebook, Twitter, Youtube, Instagram dan lainnya. Sosial media ini tentu saja menyumbangkan efek positif. Semakin gencarnya penggunaan internet dan sosial media mengarah pada kencangnya arus komunikasi, informasi dalam mendukung berbagai profesi

---

<sup>168</sup>Situs Resmi HTI, Socmed, diambil dari [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id) pada 4 Januari 2017

<sup>169</sup>Ibid, HTI. Paragraf 1

seperti; pendidikan, jurnalis, dakwah, bisnis dan sebagainya.

Bahkan Hizb berpendapat bahwa:

“Kini, data dan informasi dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan menit, bahkan detik. Begitu besarnya pengaruh media sosial, tak berlebihan bila media sosial juga disebut sebagai agen pengubah. Berkatnya, kehidupan masyarakat telah berubah secara ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik.”<sup>170</sup>

Hizb dalam adaptasi sosial politik dan budaya juga memanfaatkan fasilitas ini untuk kegiatan dakwah. Karena hingga saat ini, Hizb sudah berkembang ke hampir 50 negara di seluruh benua. Melalui media ini, Hizb dapat berbagi tulisan, video, gambar, audio dan pendapat ke seluruh penjuru bahkan bisa menjadi alat rekrutmen Hizb.

### *1. Media Online*

#### *a. Websites (Situs Jaringan)*

Dalam menyebarkan ide, Hizb menggunakan situs resmi Hizb <http://www.hizbut-tahrir.or.id/> sebagai media informasi utama. Di dalam situs ini, Hizb melengkapinya dengan berbagai fitur dengan laporan isu domestik maupun internasional. Berbagai informasi tersebut dapat diakses

---

<sup>170</sup>Ibid, HTI. Paragraf 3

(disalin maupun unggah) untuk pemenuhan studi maupun penelitian. Artikel yang dikeluarkan di websites murni sepenuhnya pendapat Hizb baik juru bicara, kantor media pusat, Amir, maupun penulis sendiri. Websites menyediakan *link* yang mengkoneksikan ke Hizb di daerah dan negara lain<sup>171</sup>. situs ini memudahkan publik untuk melihat perkembangan Hizb di seluruh dunia melalui kegiatan yang berupa foto dan video.

Situs Hizb juga memperluas dan mempermudah pembaca internasional dengan menyediakan *Arab* dan *English section*. Ada beberapa laman dengan kategori yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga situs ini bisa diakses siapapun. Juga menyediakan laman muslimah Hizb (MHTI) yang bisa diakses bagi Muslimah di Indonesia. Karena perempuan adalah pencetak generasi peradaban, maka dari itu laman Muslimah menjadi fokus bagi (perempuan) agar melek dengan keadaan dan situasi saat ini baik domestik maupun internasional. Di dalam situs Hizb, terdapat kategori media yang daftarnya berisi Majalah Al-Wai'e, Buletin Al-Islam dan

---

<sup>171</sup> Lihat situs resmi HTI, [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)



HTI Channel. Pengunjung di situs ini juga bisa memberikan komentar dan timbal balik terhadap Hizb.

Dalam situs, Hizb juga sangat memanfaatkan peran audio visual untuk menyebarkan pesan mereka dan ini dilakukan oleh tim profesional Hizb serta bertanggung jawab dalam pengambilan gambar baik itu di seminar, demonstrasi, maupun konferensi.

b. Facebook (Fanpage)

Facebook adalah jaringan sosial media yang memiliki potensi yang sangat besar. Jangkauan yang sangat luas dan pengguna yang mencapai lebih dari 1,79 miliar setiap bulannya aktif menggunakan sosial media ini. Menurut Facebook MAUs, setiap tahun penggunaannya meningkat 16 %.<sup>172</sup> Ini dimanfaatkan Hizb dalam menyebarkan ide dan menyatakan eksistensinya. Hizb memiliki fanpage pusat “Hizbut Tahrir Indonesia” dengan 10.901<sup>173</sup> orang yang menyukai laman ini dan “Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia”

---

<sup>172</sup>Facebook as of 11/02/16

<sup>173</sup> Lihat fanpage Hizbut Tahrir Indonesia pada 2 Januari 2017

dengan 19.840 orang yang menyukai laman ini<sup>174</sup>. Halaman ini aktif diperbaharui secara berkala mengenai aktivitas, kegiatan dan penyebaran informasi nasional maupun internasional.

Selain situs resmi yang dikeluarkan, anggota Hizb juga memanfaatkan sumber online informal untuk menyebarkan tujuan Hizb. Anggota Hizb juga berkontribusi dalam berbagai forum diskusi *online*. Tujuannya untuk memperkenalkan ide Hizb dan agenda-agenda yang diselenggarakan oleh Hizb. Aktivitas ini bisa meningkatkan situs jaringan media *online* facebook dan mendorong teman-teman pengguna facebook bisa menghadiri dan mengikuti Hizb secara fungsional maupun simpatisan.

### c. Twitter

Data statistik menunjukkan sepertiga tahun 2016, pengguna twitter rata-rata mencapai 317 milyar pengguna aktif.<sup>175</sup>Hingga akhir Desember 2016, pengikut akun twitter Hizbut Tahrir Indonesia memiliki 40,4 K pengikut dan

---

<sup>174</sup> Fanpage HTI, <https://www.facebook.com/HTIID/>

<sup>175</sup><https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/>

meningkat pada awal Januari 2017 menjadi 40,8 K pengikut. Hizb mulai aktif di twitter sejak Oktober tahun 2011. Postingan Hizb sekitar isu kontemporer nasional maupun internasional. Hizb juga memainkan perannya di *twitter* yang notabene salah satu jenis sosial media yang paling aktif yang digunakan oleh penduduk di seluruh dunia.

d. Youtube

Media sosial yang berfungsi jaringan publikasi dan pembagian video yang mulai rilis pada tahun 2005. Hizb memanfaatkan media ini sebagai dokumentasi audio visual dari berbagai agenda dan pendapat mengenai berbagai isu sosial-politik yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Youtube adalah *media sharing* yang cukup efektif dalam mengenalkan sebuah gerakan (dalam konteks ini Hizb) sebagai bentuk *real* berupa video. Masyarakat bisa melihat langsung opini dan kegiatan Hizb dalam menyuarakan ide *khilafah Islamiyah* dan eksistensinya terhadap fenomena publik. Hal ini juga bentuk kepedulian Hizb dalam membangun kesadaran umat terhadap problem yang ada di tengah masyarakat.

Hizb memiliki *channel* (saluran) di youtube bernama HTI Channel dengan jumlah pelanggan 8990 pelanggan dan ini bertambah secara berkala. Hingga saat ini jumlah video yang diunggah sebanyak 913 video. Hizb mulai aktif di *youtube* sejak 3 tahun terakhir<sup>176</sup>. Video yang diunggah seputar isu terkini baik lokal maupun internasional. Video yang diunggahpun menuai berbagai komentar (setuju maupun tidak setuju dengan opini Hizb). Apalagi video mengenai khilafah dan syariah Islam.

Hizb memiliki banyak pelanggan karena video yang diunggah mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat seperti video “Ustadz Felix dengan topik “Mengapa harus Tolak Ahok?”. Video ini ditonton sebanyak 390.744 kali dan mendapatkan respon positif di kolom komentar. Begitu juga video “Awas! Makar Militer Amerika di Jantung Ibu Kota” ditonton sebanyak 162.584, “Valentine Day untuk Siapa?” ditonton sebanyak 33.594 kali, “Penjelasan seputar Deklarasi Khilafah” ditonton sebanyak

---

<sup>176</sup> Survey penulis dengan melihat HTI channel

64.623 kali, “Cinasisasi dibalik Teluk Jakarta” ditonton sebanyak 30.119 kali, “90 Tahun sejak Keruntuhan Khilafah” ditonton sebanyak 33.959 kali, “Penghina Al-Qur’an Cukup Minta Maaf?” ditonton sebanyak 70.730 kali, “Aksi Damai Tolak Pemimpin Kafir” ditonton sebanyak 20.410 kali, “Harry Mukti, Semua Akan Berakhir” ditonton sebanyak 44.576 kali dan banyak lagi video yang mencapai *viewer* puluhan ribu. Rata-rata *viewer* yang dihasilkan dari unggahan HTI Channel mencapai 300-400.000. Dari berbagai video yang diunggah, tidak sedikit yang menyatakan setuju akan pergerakan Hizb dan mengakui syariah sebagai nilai yang baik dapat diterapkan di Indonesia.

e. Sosial Media Pendukung Lainnya

Hizb memiliki instagram dengan nama *hizbuttahririd* dengan jumlah pengikut sebanyak 65,1 K<sup>177</sup>. Instagram (dikenal IG) adalah situs online dengan fungsi *photo* dan *video* sharing. Layanan yang dibeli Facebook pada tahun 2012 memiliki pengguna yang berkembang pesat. Dalam waktu lima setengah tahun, Instagram meroket sampai

---

<sup>177</sup> Lihat instagram Hizbut Tahrir. Data ini terakhir dilihat pada 3 Januari 2017

mengalahkan Twitter, terutama karena media sosial Instagram banyak dipakai selebriti terkenal dan bintang olah raga. Hingga juni 2016, pengguna instagram mencapai 500 juta di seluruh dunia<sup>178</sup>.

Postingan yang dikeluarkan dalam instagram resmi Hizb, lebih banyak menyampaikan mengenai isu sosial politik yang terjadi saat ini dan video *promoting khilafah*. Template foto dikemas dengan sangat menarik dan dilengkapi dengan video liputan langsung dari berbagai aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Hizb. Hizb mulai aktif di IG sejak Mei 2015 tahun lalu dengan jumlah *lover* meningkat 250% dua minggu berikutnya<sup>179</sup> dan terus meningkat jumlah yang menyukai seiring bertambahnya pengikut.

Hizb juga aktif di dalam Google+ 2191 pengikut<sup>180</sup>. Situs jejaring sosial ini didirikan oleh perusahaan Google pada Juni 2011 yang fungsinya untuk menyaingi facebook. Jejaring sosial ini memiliki fungsi yang sangat meluas karena

---

<sup>178</sup> Dave lee, *Pengguna Instagram Mencapai 500 Juta*, diambil dari [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/06/160621\\_majalah\\_instagram\\_medsos](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/06/160621_majalah_instagram_medsos) pada 4 Januari 2017

<sup>179</sup> Ibid, IG Hizbut Tahrir.

<sup>180</sup> Lihat Google+ Hizbut Tahrir ada 2191 orang yang berada di lingkaran. Terakhir dilihat pada 3 Januari 2017

terintegrasi dengan fitur seperti; hangout, messenger, instant upload, stream, sparks, Google Profile dan Google Buzz. Dengan ini, dalam penyebaran dan memperkenalkan ide, Hizb akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan pengikut semakin banyak pengguna yang menggunakan jejaring ini. Pada jejaring ini akan mudah terdeteksi berapa pengikut yang sedang berada di lingkaran atau mengikuti isu yang diunggah oleh Hizb.

## 2. *Media Cetak*

### a. Al-Islam

Pada awal pengembangan gerakan Hizb di Indonesia, pemimpin HTI membentuk sebuah Kelompok Studi Islam Standard Chartered (KSICC). Banyak program yang diformulasikan dalam gerakan ini termasuk memproduksi buletin Al-Islam<sup>181</sup>. Media ini mulai diproduksi sejak tahun 1994 dan tercatat sudah masuk edisi 837 pada 30 Desember

---

<sup>181</sup> Loc.Cit. Mohamed Nawab Mohamed Osman . Hal. 6

2016 yang diterbitkan<sup>182</sup>. Buletin ini dikeluarkan setiap 1 minggu sekali dengan tema yang berbeda dan hangat. Juga didistribusi dari tangan ke tangan maupun ke masjid.

Buletin Al-Islam ini mengarahkan komunitas di Jakarta pada waktu itu kepada ide Hizb. Hizb memulai sesi *Temu Pembaca Al-Islam* dalam mengarahkan komunitas tersebut<sup>183</sup>. Sesi ini dimaksudkan mengarahkan peminat Islam kepada KSICC dan HTI atau dengan kata lain mekanisme perekrutan. Pada Era Soeharto, era dinamik bagi organisasi Islam termasuk Hizb. Kemudian pada tahun 2000, secara resmi Hizb mengumumkan sebagai organisasi resmi dan mengeluarkan kembali Buletin Al-Islam pada Juli 2000<sup>184</sup>. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Hizb menjadikan *Syabab Hizbut Tahrir Indonesia* (Persaudaraan Hizbut Tahrir) sebagai penerbit buletin.

---

<sup>182</sup>HTI, Al-Islam, diambil dari <https://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/page/49/>

<sup>183</sup> Loc.Cit. Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal. 6

<sup>184</sup>Isu pertama yang diterbitkan Al-Islam dengan fitur tentang Hijrah menuju Khilafah Islamiyah. Artikel tersebut menyoroti pentingnya mengembalikan Khilafah Islamiyah. lihat “Hijrah” Menuju Khilafah Islamiyah” no. 1, (July 2000), 1-2.



b. Al-Wai'e

Al-Wai'e adalah media politik dan dakwah yang diproduksi Hizb dalam membangun kesadaran umat. Majalah ini dipublis setiap bulan. Al-Wai'e pertama kali diterbitkan pada tahun 2000<sup>185</sup>. Berbeda dengan Al-Islam, Al-Wai'e memiliki isi yang lebih intelektual. Biasanya Al-Wai'e disebarakan kepada para mahasiswa, intelektual, akademisi dan lainnya<sup>186</sup>. Tidak hanya itu, artikel pada majalah ini mengulas isu domestik atau internasional yang berkaitan dengan dunia Islam. Peminat majalah ini terlihat dengan terjualnya ratusan ribu cetakan majalah dan ini meningkatkan popularitas Hizb dan ini merupakan suatu pencapaian bagi Hizb. Hingga saat ini, majalah Al-Wai'e tersebar ke lebih dari 90 agen yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia bahkan Australia<sup>187</sup>.

Kategori yang dijadikan partisi majalah al-wai'i adalah seputar Afkar, Akhbar, Analisis, Catatan Jubir, Cover, Dari Redaksi, Dunia Islam, Fokus, Galeri Opini, Hadis

---

<sup>185</sup> Op.Cit. Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal.11

<sup>186</sup> Observasi penulis dalam mengikuti banyak agenda HTI.

<sup>187</sup> Lihat bagian belakang di setiap edisi majalah Al-Wai'e

Pilihan, Hiwar, Ibrah, Iftitah, Iqtishadiyah, Jejak Syariah, Kesaksian, Kisah Inspiratif, Kritik, Lintas Dunia, Liputan Khusus, Mancanegara, Muhasabah, Nisa', Opini, Refleksi, Reportase, Sirah, Siyasah & Dakwah, Soal Jawab, Sosok, Suara Pakar, Ta'rifat, Tafsir, Telaah Kitab. didistribusi setiap sebulan sekali dengan tema yang berbeda dan hangat<sup>188</sup>.

c. Buku

Selain majalah, Hizb juga menerjemahkan banyak buku ke dalam bahasa Indonesia<sup>189</sup>. Anggota Hizb memiliki beberapa rumah produksi di Bogor, pinggir kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Rumah produksi ini termasuk *Pustaka Thariqul Izzah*, *Al-Izzah Press* dan buku terjemahannya disebut sebagai *Mutabannat* (teks dasar) dan sering digunakan sebagai buku pembahasan Hizb. Berdasarkan hasil wawancara Mohamed Nawab Mohamed Osman dengan Hafidz Abdurrahman pada tahun 2008 di Bogor ada lebih dari

---

<sup>188</sup> HTI, Al-Wai'e pada [www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)

<sup>189</sup> Loc. Cit. Mohamed Nawab Mohamed Osman. Hal 13

50.000 salinan buku yang sudah diterbitkan. Semua publikasi yang dicetak oleh Hizb adalah terbitan rumah produksi yang ditulis oleh ideologi Hizb. Hizb juga menerbitkan buku kecil untuk penyebaran kepada publik dan hasilnya ratusan ribu salinan buku kecil/saku diterbitkan.

## BAB V

### KESIMPULAN

Mengutip dari pernyataan Hafidz Abdurrahman (Ketua Hizb) menegaskan bahwa Khilafah dapat dihidupkan kembali ketika perubahan sikap terjadi dalam komunitas Muslim. Hal ini hanya dapat dibawa melalui dakwah, pendidikan dan pengembangan Muslim yang komprehensif. Hal ini jelas bahwa Hizb sedang mencoba untuk mengubah sikap umat Islam di Indonesia terhadap Syariah dan Khilafah. Hizb percaya bahwa *Khilafah* dapat dibentuk hanya jika ide didukung oleh umat Islam. Juga, ketua Hizb percaya bahwa hal praktis untuk menerima kenyataan bahwa *khilafah* hanya bisa dibentuk di Indonesia melalui dukungan yang luas dan elit di Indonesia.

Pada saat ini Hizb berada pada tahapan memahami, belum pada posisi yang cukup untuk mengambil kekuasaan. Karena upaya membangun *thalabun nushroh* (mencari dukungan elit) masih dalam kondisi benang merah. Tataran elit dan penguasa negara masih dalam posisi toleransi yakni menerima gerakan organisasi Islam dengan memaklumi ide yang

disuarakan. Dukungan hanya sebatas memenuhi undangan belum meyakini bahwa ide *khilafah* benar-benar menjadi solusi yang terbaik untuk perubahan di Indonesia.

Perlu digaris bawahi, konsistensi Hizb di Indonesia memberikan pengaruh yang penting secara sadar maupun tidak disadari. Konsistensi menyuarakan dan mengarusutamakan ide *khilafah* memberikan aura tersendiri bagi masyarakat umum. popularitas dan gencarnya melaksanakan kegiatan di Indonesia tidak menutup kemungkinan Hizb di Indonesia memiliki posisi penting di dalam masyarakat maupun negara nantinya. Walaupun organisasi Hizb ukurannya yang kecil tapi ke depan memiliki efek jangka panjang pada politik Indonesia. Sangat mungkin bahwa opini yang dikeluarkan Hizb mengangktatisu yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di Indonesia dan ini akan menghasilkan penguatan Hizb. Demikian juga, krisis ekonomi yang mengakibatkan jamur kemiskinan dan ditambah dengan melonjaknya biaya hidup di Indonesia memberikan kepercayaan terhadap klaim Hizb bahwa kapitalisme tidak Islami dan harus ditolak. Yang paling penting, kemampuan Hizb dalam

mempengaruhi berbagai elemen masyarakat dengan ajakan dan pendekatan pemikiran.

Permasalahan yang tidak kunjung padam di dunia Internasional khususnya di Indonesia saat ini tidak menutup kemungkinan banyak kalangan yang mencari solusi alternatif dalam memecahkannya. Tak ayal banyak yang mengajukan *Khilafah* menjadi sistem terbaik dan menjadi solusi permasalahan yang ada di dunia. Pengaruh dan intervensi peradaban Barat telah banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi pada sosial, politik dan budaya Indonesia. ini dikarenakan *missperceptions* pada pemerintahan terhadap modernisme yang dikira mampu mengarahkan kemajuan dan cocok diterapkan di Indonesia ternyata menimbulkan permasalahan yang akut.

Ancaman Hizb saat ini, memang Hizb memposisikan diri sebagai partai yang logis dan terus terang tetapi anti kekerasan. Keinginan untuk mengembalikan *Khilafah* ke tengah umat dan menjadi sistem umum negara adalah bertentangan langsung dengan ideologi negara Indonesia, Pancasila. Hizb cenderung memiliki tameng untuk menentang ideologi negara Indonesia yang saat ini diakui mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Namun demikian, tidak mungkin bahwa visi Hizb Indonesia dapat dicapai dalam waktu dekat.

Kemungkinan tersebut terlihat dari upaya konstruksi sosial yang dilakukan oleh Hizb kepada masyarakat Indonesia dalam memasukkan ide *khilafah* sebagai suatu keyakinan. Upaya ini perlu diacungi jempol dan keaktifan gerakan dalam melihat fenomena sosial saat ini. Tahapan yang sedang dilalui Hizb seperti *obyektivikasi* melalui penyamaan pemikiran mengenai ide *khilafah* dirasa cukup adil dan terbuka. Kesimpulan yang ditarik Hizb memiliki argumen yang kuat begitupun kelompok lain yang kontra terhadap Hizb. Tetapi perlu ditekankan keinginan dari berbagai kelompok Islam untuk menerapkan nilai Islam di Indonesia mengungguli kata sepakat dan sama dengan prinsip dasar Hizb. Ini bisa saja dijadikan kekuatan bagi Hizb untuk terus menyuarakan *khilafah*.

Kemudian, tahapan *internalisasi* Hizb melalui pendekatan pemikiran adalah aktivitas yang logis dan sesuai dengan kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia. keadaan yang heterogen memposisikan Hizb menjadi gerakan pemikiran yang adaptif. Dalam artian, masyarakat saat ini adalah masyarakat

yang kritis dan memiliki pemahaman yang berbeda di setiap golongan. Upaya-upaya pendekatan pemikiran dengan jalan dakwah seperti diskusi publik, seminar, konferensi, temu tokoh dan lain sebagainya merupakan aktivitas pemikiran yang mengajak publik untuk berpikir. Aktivitas ini adalah bentuk sosialisasi ide *khilafah* yang dilakukan Hizb ke publik dalam area yang lebih terbuka dengan target yang disesuaikan.

Terakhir, tahapan *eksternalisasi* melalui media publikasi merupakan manifestasi keinginan publik terhadap perkembangan zaman. Dalam proses ini, Hizb melanjutkan visi dengan menyesuaikan diri atas kehendak publik atau kondisi yang sedang digandrungi masyarakat saat ini. Hizb menggunakan media teknologi komunikasi untuk memperluas jaringan. Penggunaan sosial media baik *offline* maupun *online* adalah cara yang cukup efektif dalam menyebarkan ide Hizb. Tidak sedikit yang mengikuti agenda Hizb di berbagai aktivitas karena publikasi kegiatan Hizb yang aktif di media.

Kesimpulannya, dengan upaya yang dilakukan Hizb selama masuk ke Indonesia dan perkembangannya yang begitu pesat ada kemungkinan bahwa Hizb akan meningkatkan



pengaruhnya di masa depan karena strategi mobilisasinya. Hizb dalam upayanya cukup kompatibel dalam mengambil peran di dalam hati masyarakat dan menkonstruksi ide *khilafah* sebagai sebuah kepercayaan umum (opini publik) yang ini benar keberadaannya. Walaupun ini akan menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia.